

MATRIKS INDEKS VARIASI PENDAPATAN (MIVP) TENAGA KERJA

Oleh:

Dr. Ir. Syarwani Canon, M.Si

(Staf Pengajar/Peneliti Ekonomi Regional, Universitas Negeri Gorontalo)

Email: svarwanic@yahoo.co.id dan wanicanon@yahoo.co.id

Hp: 085240017324

Deskripsi Temuan: Tulisan ini merupakan suatu derifasi matriks indeks variasi pendapatan (MIVP) dari Indeks Williamson dan statistik χ^2 . MIVP dapat mengukur indeks kesenjangan secara total (seperti model williamson), secara wilayah (seperti model Theil), secara sektoral (seperti model Gini) maupun menurut individu (sektor wilayah), serta mampu mengidentifikasi individu/sektoral/wilayah yang mempengaruhi tarikan kesenjangan pendapatan di atas atau di bawah rata-rata.

Abstrak

Matriks Indeks Variasi Pendapatan (MIVP) merupakan suatu indeks yang dikembangkan dari koefisien variasi dan statistik χ^2 sehingga menghasilkan output baik secara total seperti Indeks Williamson/Theil, secara kelompok wilayah seperti Indeks Theil, secara sektoral seperti Indeks Gini, maupun menurut individu (sektor wilayah). Disamping itu MIVP dapat mengidentifikasi individu/sektoral/wilayah yang mempengaruhi tarikan kesenjangan pendapatan di atas atau di bawah rata-rata. Dalam penerapannya, MIVP akan memberikan hasil yang lebih maksimal bila dipadukan dengan Indeks Produktivitas Tenaga Kerja (IPTK).

Hasil pengujian MIVP di Indonesia menunjukkan bahwa tingginya kesenjangan pendapatan di Indonesia dipengaruhi oleh sumbangan ekonomi wilayah, sumbangan tenaga kerja wilayah, karakter sektor ekonomi wilayah, dan potensi wilayah dari tiap provinsi.

Kata Kunci: *distribusi pendapatan, total, wilayah, sektor, sektor wilayah.*

PENDAHULUAN

Efisiensi dan efektifitas kinerja ekonomi antar wilayah, telah menjadi isu yang sangat penting dalam kajian pembangunan ekonomi spasial. Salah satu permasalahan krusial pembangunan ekonomi spasial adalah kesenjangan pendapatan didalam dan antar wilayah yang berakar dari permasalahan heterogenitas wilayah. Namun dalam pemecahan permasalahan tersebut sering menggunakan indikator-indikator makro yang mengasumsikan keadaan wilayah bersifat homogen.

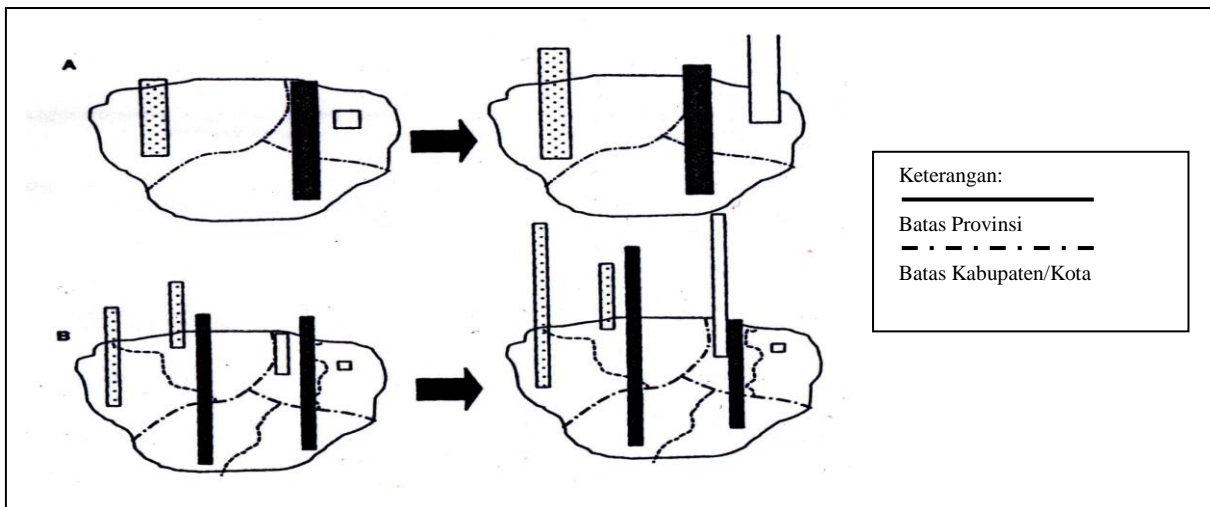
Indikator-indikator makro tersebut hanya mewakili penilaian wilayah secara umum, karena merupakan konsep rata-rata dan kurang memperhatikan aspek sebaran sosial ekonomi didalam dan antar wilayah. Bahkan pada formula indikator distribusi pendapatan penduduk, masih menggunakan asumsi bahwa sebaran pendapatan dalam setiap wilayah adalah homogen. Kesenjangan pendapatan atau distribusi pendapatan penduduk didalam dan antar wilayah merupakan suatu masalah universal, karena pada kondisi bagaimanapun kesenjangan pendapatan hampir dapat dipastikan selalu terjadi. Terjadinya permasalahan tersebut dikarenakan adanya heterogenitas posisi geografis, potensi-potensi dan tingkat produktivitas yang terjadi pada setiap wilayah (Dumairy, 1999; dan Nurzaman, 1997).

Carlino (1992) dan Browne (1989) dalam Esteban, (1999) menyatakan kesenjangan antar wilayah di Amerika Serikat berhubungan dengan tingkat perbedaan ketenagakerjaan. Terjadinya kesenjangan pendapatan antar wilayah disebabkan oleh satu atau beberapa dari wilayah dominan memberikan dampak *backwash effect* ataupun *polarization effect* terhadap faktor-faktor ekonomi pada wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Pada akhirnya terjadi keterlambatan pertumbuhan ekonomi pada wilayah-wilayah lainnya. Untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antara wilayah lebih berkembang dan wilayah kurang berkembang maka diperlukan kebijakan pengembangan wilayah (Hirschman, 1968 dalam Nurzaman, 1997; Schinke, 1998; Friedmann 1986 dalam Rukmana 1995). Menurut Hoover, (1977) pada umumnya tingkat pendapatan per kapita pada masyarakat perkotaan lebih tinggi dari pada masyarakat non perkotaan, dan akan terus berlanjut jika tidak ada penanganan serius. Hasil penelitian Irving Hock (1972) di AS menunjukkan bahwa tingkat pendapatan per kapita dipengaruhi oleh keadaan kota. Tingkat pendapatan per kapita masyarakat perkotaan di wilayah Utara dan Barat lebih tinggi dari pada wilayah selatan, namun dalam periode waktu 1929-1962 secara lambat laun mulai mengecil perbedaannya.

Hasil pemikiran dan penelitian tersebut sejalan dengan konsep *Generative Growth Theory* dan *Competitive Growth Theory* (Budiharsono, 1988). *Generative Growth Theory*; menyatakan bahwa pada saat perekonomian negara bertumbuh mantap, banyak persoalan ekonomi dapat terselesaikan. Dalam hal ini beberapa wilayah memang akan tumbuh lebih cepat dari pada wilayah yang lain, dan jika semua wilayah menikmati kualitas pertumbuhan ekonomi yang sama, maka proses distribusi pendapatan akan terus berlangsung. Dengan kata lain kualitas laju pertumbuhan ekonomi nasional akan menjadi semakin lebih baik jika laju pertumbuhan perekonomian dari wilayah terbelakang dapat ditingkatkan. Sedangkan *Competitive Growth Theory*; didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan ekonomi nasional ditentukan oleh beberapa kekuatan eksogen, dan seolah-olah terbagi pada beberapa wilayah. Situasi ini terjadi jika kualitas laju pertumbuhan ekonomi negara rendah, sehingga pertumbuhan ekonomi beberapa wilayah terus berlangsung namun pertumbuhan ekonomi wilayah lainnya dikorbankan.

Dalam berbagai analisis untuk melihat kualitas sebaran pendapatan antar wilayah selalu menggunakan variabel pendapatan per kapita wilayah, sebab variabel tersebut relatif lebih mudah diperoleh dibandingkan dengan variabel lainnya seperti pendapatan per kapita sektor ekonomi. Untuk lebih jelasnya, akan disinggung beberapa alat analisis yang sering digunakan dalam mengukur kualitas distribusi pendapatan antar wilayah.

Indeks Williamson (WI) yang diperkenalkan oleh Jeffrey G. Williamson (1965) merupakan suatu alat analisis untuk melihat kualitas distribusi pendapatan secara total dari keseluruhan wilayah. Williamson mengemukakan model V_w (indeks tertimbang) dan V_{uw} (tidak tertimbang) untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan per kapita suatu negara pada waktu tertentu.



Sumber : Siti S. Nurzaman (2002).

Gambar 1: Kesenjangan Wilayah Dengan Pembagian Wilayah Yang Berbeda.

Dari perhitungan yang dilakukannya pada beberapa negara terlihat bahwa kesenjangan pendapatan antar wilayah cenderung berubah mengikuti suatu trend yang berbentuk U terbalik. Pada tahap awal pembangunan derajat kesenjangan pendapatan antar daerah meningkat, selanjutnya mengalami masa stabil, dan pada akhirnya menurun kembali. Pada negara-negara tertentu bentuk tersebut tidak sepenuhnya berlaku dan ada variasi-variasi tertentu yang bersifat khusus. Nilai WI juga akan memberikan hasil yang berbeda jika pembagian wilayah dalam suatu negara mengalami perubahan seperti pemekaran kabupaten atau provinsi. Fenomena tersebut divisualisasikan pada Gambar 1. Menurut Gore dalam Nurzaman (2002), menyatakan bahwa keadaan perkembangan akan menjadi divergen jika pembagian kabupaten/kota dalam suatu provinsi seperti Gambar 1A. Namun jika provinsi tersebut memekarkan kabupaten/kota menjadi lebih banyak, maka perkembangannya menjadi konvergen seperti ditunjukkan pada Gambar 1B. Dalam gambar tersebut diasumsikan bahwa produktifitas tenaga kerja tersebar merata pada setiap wilayah pengamatan. Tentunya keadaan ini lebih disebabkan oleh penggunaan data yang mengasumsikan bahwa pendapatan masyarakat setiap wilayah adalah homogen. Padahal kenyataannya masyarakat yang hidup dalam suatu wilayah terbagi dalam beberapa sektor ekonomi, kemudian setiap sektor ekonomi tersebut mempunyai tingkat produktivitas tenaga kerja yang sangat bervariasi¹. Pada Tabel 1 ditunjukkan bahwa Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, serta Sektor Jasa-Jasa adalah tiga sektor utama di Indonesia yang memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja paling rendah, dan lapangan kerja kelompok sektor ini tersebar hampir merata di semua wilayah. Disamping itu ketiga sektor tersebut secara-rata rata (dari tahun 2004-

¹ Hasil kajian Canon (2008) dalam menghitung tingkat produktivitas tenaga kerja per sektor wilayah dengan menggunakan Indeks produktivitas Tenaga Kerja:

$$y_{pi} = \frac{y_i/Y}{l_i/L}$$

Keterangan:

y_{pi} = IPTK sektor i dalam suatu waktu tertentu; Y= Total output yang dihasilkan; L= Total tenaga kerja yang digunakan; y_i = Total output sektor i yang dihasilkan; l_i = Total tenaga kerja sektor i yang digunakan. $y_{pi} \geq 1$:Tenaga kerja sektor i produktif, dan jika $y_{pi} < 1$:Tenaga kerja sektor i tidak produktif.

2010) menyerap 53,86% dari keseluruhan tenaga kerja, namun hanya mampu menghasilkan 24,40% total output dalam perekonomian.

Tabel 1: Perkembangan Indeks Produktifitas Tenaga Kerja Indonesia

No	Indeks TK Harga Konstan	2004	2006	2008	2010	Rata-rata
1	Pertambangan & Penggalian	10.33	6.03	9.13	9.24	8.50
2	Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	7.58	4.68	7.86	8.38	6.70
3	Listrik, Gas & Air Bersih	5.84	3.56	5.94	6.19	5.11
4	Industri Pengolahan	2.15	1.32	2.15	2.16	1.87
5	Konstruksi	1.15	0.74	1.27	1.40	1.05
6	Pengangkutan dan Komunikasi	1.05	0.70	1.25	1.50	1.00
7	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.06	0.68	1.16	1.26	0.97
8	Jasa-jasa	0.85	0.53	0.90	0.98	0.76
9	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	0.39	0.23	0.37	0.38	0.33

Sumber : BPS, diolah.

Sebaliknya, sektor-sektor produktif sangat dipengaruhi oleh potensi sumberdaya alam dan aktivitas ekonomi wilayah seperti teknologi, kualitas pendidikan, posisi geografi yang kesemuanya tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah pengamatan. Tentunya jika terjadi pemekaran wilayah baik dalam negara atau provinsi, maka sektor-sektor produktif tersebut tidak akan terbagi secara merata ke seluruh wilayah, namun ada kemungkinan akan berpindah ke wilayah pemekaran atau tetap dengan wilayah induknya. Peristiwa ini akan berpengaruh terhadap perubahan nilai Indeks Variasi Williamson. Itulah sebabnya Nurzaman (2002) menyatakan bahwa harus dipikirkan untuk tujuan apa analisis Indeks Williamson dilakukan. Jika pembagian wilayah tidak tepat untuk tujuan studi maka akan memberikan hasil analisis yang kurang jelas dan tentunya berimplikasi pada kesimpulan yang menyimpang dan kebijakan yang tidak kena sasaran. Secara matematis nilai indeks Williamson diturunkan dari koefisien variasi seperti pada Persamaan 1.

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{N} \quad (1)$$

Nilai yang dihasilkan oleh koefisien variasi pada Persamaan 1 tidak melibatkan koefisien proporsional menurut sub wilayah, dan oleh Williamson dilakukan modifikasi sehingga menjadi indeks variasi tertimbang seperti pada Persamaan 2.

$$WI = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \frac{p_i}{p}}}{\bar{y}} \quad (2)$$

Keterangan :

- y_i = Pendapatan per kapita wilayah ke i
- \bar{y} = Pendapatan per kapita seluruh wilayah
- p_i = Populasi wilayah ke i
- p = Populasi seluruh wilayah.

Model indeks kesenjangan pendapatan lainnya yang lebih memperhatikan aspek sub wilayah adalah Indeks Theil. Indeks ini dikemukakan oleh ahli ekonometrika Henri Theil (1967)

dari indeks entropy. Indeks entropy (Persamaan 4) mempunyai kemiripan dengan Statistik Wilks atau *likelihood ratio* yang dinyatakan dalam Persamaan 3. Namun dari hasil penelitian Jinying Zhao, *et. al* (2006) menunjukkan bahwa pada tingkat kesalahan tipe I dari tes heterogenitas, statistik χ^2 dan statistic entropy memberikan hasil yang lebih baik dari pada statistik likelihood ratio. Secara detail perbandingan pengujian heterogenitas antara, statistik χ^2 , statistic entropy, dan statistik likelihood telah diteliti oleh Jinying Zhao, *et. al* (2006) yang ditampilkan pada Gambar 2. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa statistik χ^2 dan statistic entropy mempunyai pola yang sangat mirip, sebaliknya statistik likelihood mempunyai pola yang berbeda dibandingkan dengan keduanya.

$$G^2 = 2 \sum_j O_{ij} \ln \frac{O_{ij}}{E_{ij}} \quad (3)$$

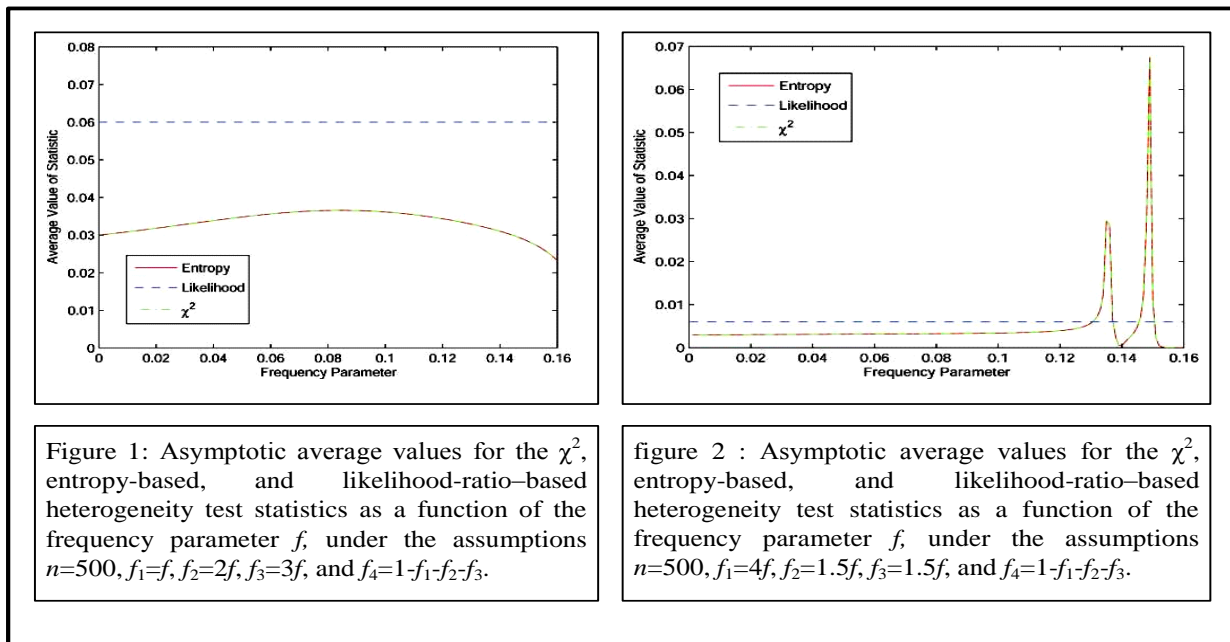
Keterangan:

O_{ij} = Nilai pengamatan sel

E_{ij} = Nilai ekspektasi sel

Berdasarkan ide indeks entropy maka Theil mengembangkan suatu alat ukur untuk menghitung kesenjangan pendapatan antar individu di dalam suatu kelompok dan kesenjangan pendapatan antar kelompok (Persamaan 4).

$$L_{Theil} = \sum_i \sum_j \frac{y_{ij}}{Y} \ln \left(\frac{y_{ij}}{Y} \right) / \left(\frac{p_{ij}}{p} \right) \quad (4)$$



Sumber: Jinying Zhao, *et. al* (2006)

Gambar 2: Perbandingan Heterogenitas Antara Statistik χ^2 , Statistic Entropy, dan Statistik Likelihood.

Nilai pada Persamaan 4 terbagi menjadi dua bagian yaitu kesenjangan antar wilayah (*between-region inequality*) serta kesenjangan dalam wilayah (*within-region inequality*) seperti pada Persamaan 5 dan 6.

$$L_{Theil} = L_B + L_W \quad (5)$$

$$L_{Theil} = \sum_i \sum_j y_{ij} \ln \left(\frac{y_{ij}}{p_{ij}} \right) + \sum_i \sum_j \left(\frac{y_i}{Y_{ij}} \right) \ln \left(\frac{y_i}{Y_{ij}} \right) / \left(\frac{p_i}{p_{ij}} \right) \quad (6)$$

Keterangan:

y_{ij} = Pendapatan per kapita sub wilayah i wilayah j

y = Pendapatan per kapita wilayah j

p_{ij} = Populasi sub wilayah i wilayah j

p = Populasi wilayah j

Indeks Theil memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan indeks Williamson. Indeks ini dapat menghitung kesenjangan pendapatan antar sub wilayah dalam wilayah, kesenjangan pendapatan antar wilayah, kontribusi masing-masing wilayah/sub wilayah terhadap kesenjangan pendapatan wilayah secara keseluruhan. Namun Indeks Theil masih menggunakan bentuk data yang sama dengan Indeks Williamson yaitu pendapatan perkapita. Pendapatan per kapita berasumsi bahwa kualitas pendapatan masyarakat dalam setiap wilayah/sub wilayah pengamatan adalah homogen. Permasalahan tersebut baru terjawab dengan model Koefisien Gini yang dikembangkan oleh ahli statistika berkebangsaan Italia yaitu Corrado Gini (1912). Koefisien Gini adalah suatu ukuran dispersi statistik terhadap distribusi kelompok pendapatan dalam suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini pada berbagai negara di dunia berkisar antara 0,249 (di Jepang) sampai dengan 0,707 (di Namibia) (ensiklopedia wikipedia). Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas distribusi pendapatan kelompok masyarakat didalam setiap negara di dunia tidak merata. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu indeks distribusi pendapatan yang menggunakan data sektoral dan wilayah. Dalam dimensi ukuran wilayah indeks tersebut mampu menjelaskan seperti Indeks Williamson dan Indeks Theil, sedangkan dalam dimensi ukuran sektoral indeks tersebut mampu menjelaskan seperti Indeks Gini.

Untuk menjembatani permasalahan tersebut maka perlu dikembangkan suatu indeks baru, sehingga dapat menjelaskan kesenjangan pendapatan baik dari segi wilayah maupun sektoral. Indeks baru tersebut dikembangkan dari Indeks Williamson (Persamaan 2) yang digabungkan dengan statistic χ^2 (Persamaan 5). Dalam indeks tersebut, variabel $(y_i - \bar{y})$ dengan satu dimensi ukuran, digantikan dengan variabel $(y_{ij} - ye_{ij})$ yang merupakan variabel dengan dua dimensi ukuran. Dalam hal ini nilai rata-rata pendapatan populasi sub wilayah digantikan dengan nilai ekspektasi individu berupa populasi sektor wilayah.

Nilai y_{ij} merupakan nilai pendapatan perkapita wilayah i sektor j yang menggantikan nilai y_i sebagai pendapatan perkapita wilayah. Begitu pula dengan nilai ye_{ij} yang merupakan nilai ekspektasi tiap *individu* dalam persamaan menggantikan nilai rata-rata \bar{y} .

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \quad (5)$$

Dalam Indeks Williamson setiap data yaitu pendapatan per kapita per sub wilayah kurangi dengan dengan pendapatan per kapita wilayah $(y_i - \bar{y})$. Sedangkan dalam indeks baru setiap data

yaitu pendapatan perkapita per sektor per sub wilayah dikurangi dengan nilai ekspektasi idealnya ($y_{ij} - ye_{ij}$). Begitu juga dengan rasio populasi, dimana Indeks Williamson menggunakan rasio antara populasi sub wilayah dan populasi wilayah (p_i/p), sedangkan indeks baru merupakan rasio antara populasi sektor sub wilayah dan populasi wilayah (p_{ij}/p). Untuk variabel \bar{y} dalam Indeks Williamson dan Indeks baru tersebut sama. Persamaan 6 adalah nilai indeks total, kemudian dari persamaan tersebut diturunkan menjadi beberapa persamaan baru seperti menurut wilayah, sektor, dan sektor wilayah.

$$IC_{Total} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (y_{ij} - ye_{ij})^2 \frac{P_{ij}}{P}}}{\bar{y}} \quad (6)$$

Keterangan:

Y_{ij} = PDRB per kapita observasi wilayah i sektor j

Ye_{ij} = PDRB per kapita ekspektasi wilayah i sektor j

\bar{y} = PDRB per kapita seluruh wilayah

P_{ij} = populasi wilayah i sektor j

P = populasi seluruh wilayah

Untuk mencari nilai kesenjangan pendapatan berada di atas rata-rata pendapatan (nilai positif)

atau di bawah rata-rata pendapatan (nilai negatif) maka nilai $\sqrt{\sum_{i=2}^m \sum_{j=1}^n (y_{ij} - ye_{ij})^2 \frac{P_{ij}}{P}}$ pada

Persamaan 6 disederhanakan menjadi $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (y_{ij} - ye_{ij}) \sqrt{\frac{P_{ij}}{P}}$ seperti terlihat pada Persamaan 7.

$$IC_{Total} = \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (y_{ij} - ye_{ij}) \sqrt{\frac{P_{ij}}{P}}}{\bar{y}} \quad (7)$$

Persamaan 6 dan Persamaan 7 merupakan dua persamaan yang mirip dan akan menghasilkan nilai yang sama, namun berbeda pada tanda plus/minus. Bentuk Persamaan 7 hanya menghasilkan nilai total, sedangkan untuk mencari nilai total menurut sektor dan menurut wilayah maka persamaan tersebut harus disederhanakan kembali menjadi seperti Persamaan 8 (menurut wilayah) dan Persamaan 9 (menurut sektor).

$$IC_{Wilayah i} = \frac{\sum_{j=1}^n (y_{ij} - ye_{ij}) \sqrt{\frac{P_{ij}}{P}}}{\bar{y}} \quad (8)$$

$$IC_{Sektor j} = \frac{\sum_{i=1}^m (y_{ij} - ye_{ij}) \sqrt{\frac{P_{ij}}{P}}}{\bar{y}} \quad (9)$$

Untuk mencari nilai dari setiap sel yang menunjukkan nilai individu dari wilayah i sektor j, maka Persamaan 8 atau Persamaan 9 lebih disederhanakan kembali menjadi seperti Persamaan 10.

$$IC_{\text{Wilayah Sektor } j} = \frac{(y_{ij} - ye_{ij}) \sqrt{\frac{P_{ij}}{P}}}{\bar{y}} \quad (10)$$

Persamaan 10 menghasilkan nilai-nilai yang unik berupa nilai ICa menurut wilayah dan sektor. Nilai-nilai tersebut berupa nilai negatif yang berkisar antara -1 s/d 0, atau berupa nilai positif yang berkisar antara 0 s/d 1. Jika nilainya mendekati 0 maka semakin rendah sektor wilayah tersebut memberikan pengaruh kesenjangan wilayah, dan sebaliknya jika nilai mendekati 1 atau -1 maka semakin tinggi peran sektor wilayah tersebut memberikan pengaruh kesenjangan pendapatan wilayah. Selanjutnya jika nilai indeks sektor wilayah adalah positif maka pendapatan perkapita sektor wilayah tersebut berada di atas rata-rata wilayah ($y_{ij} > ye_{ij}$) dan sebaliknya jika nilai indeks sektor wilayah adalah negatif maka pendapatan perkapita sektor wilayah berada di bawah rata-rata wilayah ($y_{ij} < ye_{ij}$). Gambaran selengkapnya mengenai Matriks Indeks Variasi Pendapatan (MIVP) tersebut di perlihatkan pada Tabel 2.

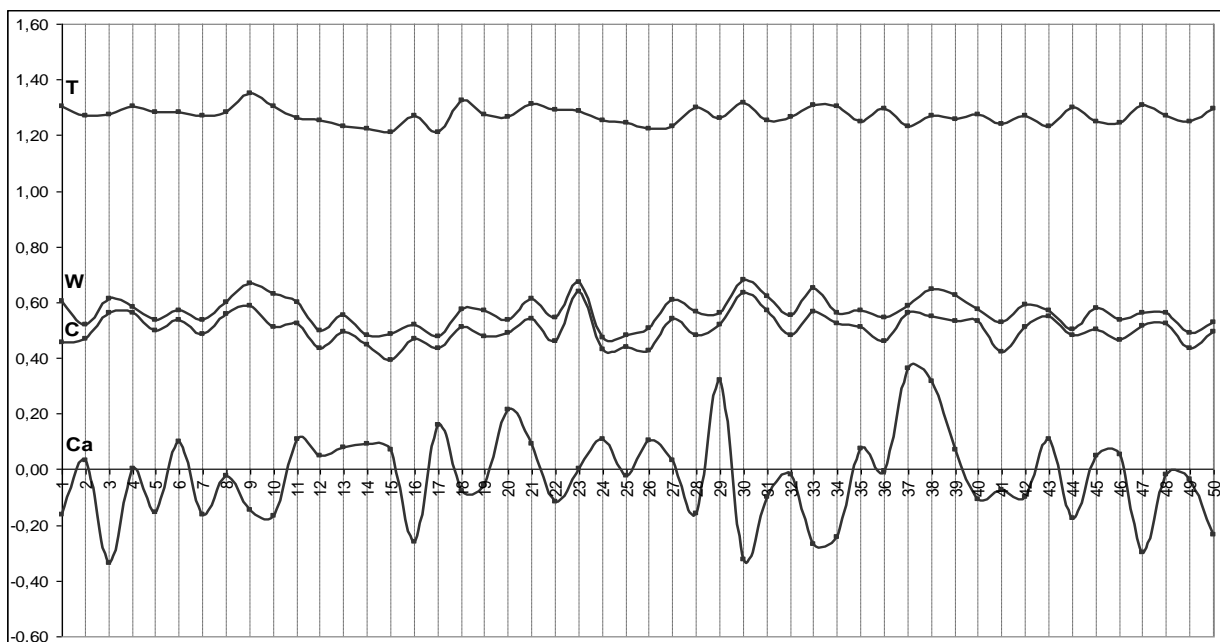
Tabel 2: Kerangka Matriks Indeks Variasi Pendapatan (MIVP).

	S ₁	S ₂	S ₃	S _{...}	S _j	Wilayah
W ₁	C ₁₁	C ₁₂	C ₁₃	C _{...}	C _{1j}	ΣC _{w1}
W ₂	C ₂₁	C ₂₂	C ₂₃	C _{...}	C _{2j}	ΣC _{w2}
W ₃	C ₃₁	C ₃₂	C ₃₃	C _{...}	C _{3j}	ΣC _{w3}
W ₄	C _{...}	C _{...}	C _{...}	C _{...}	C _{...j}	ΣC _{w...}
W _i	C _{i1}	C _{i2}	C _{i3}	C _{i5}	$C_{\text{Wilayah } j} = \frac{\sqrt{(y_{ij} - ye_{ij})^2 \frac{P_{ij}}{P}}}{\bar{y}}$	$C_{\text{Wilayah } i} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^m (y_{ij} - ye_{ij})^2 \frac{P_{ij}}{P}}}{\bar{y}}$
					$Ca_{\text{Wilayah } j} = \frac{(y_{ij} - ye_{ij}) \sqrt{\frac{P_{ij}}{P}}}{\bar{y}}$	$Ca_{\text{Wilayah } i} = \frac{\sum_{i=1}^m (y_{ij} - ye_{ij}) \sqrt{\frac{P_{ij}}{P}}}{\bar{y}}$
Sektor	ΣC _{s1}	ΣC _{s2}	ΣC _{s3}	ΣC _{s...}	$C_{\text{Sektor } j} = \frac{\sqrt{\sum_{j=1}^n (y_{ij} - ye_{ij})^2 \frac{P_{ij}}{P}}}{\bar{y}}$	$C_{\text{Total}} = \frac{\sqrt{\sum_{i=2}^m \sum_{j=1}^n (y_{ij} - ye_{ij})^2 \frac{P_{ij}}{P}}}{\bar{y}}$
					$Ca_{\text{Sektor } j} = \frac{\sum_{j=1}^n (y_{ij} - ye_{ij}) \sqrt{\frac{P_{ij}}{P}}}{\bar{y}}$	$Ca_{\text{Total}} = \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (y_{ij} - ye_{ij}) \sqrt{\frac{P_{ij}}{P}}}{\bar{y}}$

Sumber: Hasil Kajian.

Nilai indeks dapat dijumlahkan menurut baris yang menunjukkan nilai indeks wilayah i atau menurut kolom yang menunjukkan nilai indeks sektor j. Nilai indeks wilayah i dan sektor j menjelaskan seberapa besar sumbangan nilai kesenjangan tiap wilayah dan kolom tersebut. Nilai tersebut dapat berupa penjumlahan absolut atau penjumlahan biasa, namun keduanya akan memberikan pengertian yang berbeda. Penjumlahan absolut (C) mengartikan seberapa besar peran wilayah i atau sektor j terhadap kesenjangan pendapatan yang terjadi. Sedangkan penjumlahan biasa (Ca) menjelaskan seberapa besar peran wilayah i atau sektor j memberikan pengaruh terhadap kesenjangan pendapatan melalui tarikan pendapatan di atas rata-rata (Ca+) atau tarikan pendapatan di bawah rata-rata (Ca-).

Selanjutnya untuk lebih memperjelas perbedaan antara indeks Williamson, Indeks Theil, dan MIVP maka dibuat simulasi nilai total output dari ketiga indeks tersebut. Adapun data yang digunakan dalam menghitung ketiga indeks tersebut diambil dari angka random sebanyak 50 kali pengulangan. Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa nilai MIVP (nilai rata-rata $C = 0,51$ dan $Ca = -0,02$) selalu lebih rendah dari nilai Indeks Williamson (nilai rata-rata $IW=0,57$). Kemudian nilai Indeks Williamson selalu menghasilkan angka yang lebih rendah dari Indeks Theil (nilai rata-rata $IT=1,27$)². Berdasarkan Gambar 3 juga terlihat bahwa pola pergerakan kurva dari ketiga indeks cukup mirip, namun output MIVP lebih mirip dengan Indeks Williamson. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun nilai rata-rata pada Indeks Williamson (\bar{y}) digantikan dengan nilai ekspektasi (ye_{ij}) seperti pada MIVP, namun keduanya tetap memberikan pola tampilan output yang hampir sama.



Keterangan: W=Indeks Williamson, T=Indeks Theil, C=MIVP, Ca=MIVP +/-
 Sumber: Data hipotetis.

Gambar 3: Sebaran Indeks Williamson, Indeks Theil, dan MIVP, Dengan Menggunakan Angka Random Tiga Digit Dalam Lima Puluh Kali Pengulangan.

Selanjutnya nilai (C) pada MIVP mempunyai pengertian yang sama dengan Indeks Williamson dan Indeks Theil, namun indeks Ca pada MIVP mempunyai pengertian berbeda. Bila Nilai C dipadukan dengan nilai Ca maka akan memberikan suatu gambaran yang lebih rinci terhadap penyebab terjadi kesenjangan pendapatan antar wilayah. Secara detail penjelasan tersebut ditampilkan pada Tabel 3.

² Dalam berbagai referensi dijelaskan nilai Indeks Theil dan Indeks Williamson bernilai antara nol dan satu. Namun dalam beberapa hasil kajian seperti Nurzaman Nilai indeks Williamson lebih besar satu.

Tabel 3: Perbandingan Nilai C, dengan Ca+, Ca-,

Ca	Ca +	Ca -	Ca ≈ 0
C			
C Tinggi	Kesenjangan tinggi yang disebabkan sektor-wilayah tertentu dengan tingkat pendapatan per kapita di atas rata-rata. (Percobaan 36 dan 37)	Kesenjangan tinggi yang disebabkan sektor-wilayah tertentu dengan tingkat pendapatan per kapita di bawah rata-rata. (percobaan 29 dan 46)	Kesenjangan tinggi, namun sektor-wilayah dengan tingkat pendapatan perkapita tinggi dan rendah berimbang. (percobaan 18 dan 48)
C Rendah	Kesenjangan rendah namun masih terdapat sektor-wilayah tertentu dengan tingkat pendapatan per kapita di atas rata-rata. (percobaan 24 dan 26)	Kesenjangan rendah namun masih terdapat sektor-wilayah tertentu dengan tingkat pendapatan per kapita di bawah rata-rata. (Percobaan 1 dan 7)	Kesenjangan rendah, dan sektor-wilayah dengan tingkat pendapatan perkapita tinggi dan rendah berimbang. (Percobaan 32 dan 49)

Sumber: Hasil analisis.

Berdasarkan gambaran dan hasil kajian yang dibuat dalam tulisan ini, maka disusun matriks perbandingan antara Indeks Williamson, Indeks Theil, Indeks Gini, dan MIVP yang ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4: Perbandingan Nilai Antara Indeks Williamson, Indeks Theil, Indeks Gini, serta MIVP .

	Indeks Williamson	Indeks Theil	Indeks Gini	MIVP
Indeks total wilayah	√	√	-	√
Indeks antar wilayah dan sub wilayah	-	√	-	√ -
Indeks sub wilayah	-	√	-	√
Indeks total sektor	-	-	√	√
Indeks sektor wilayah	-	-	-	√
Indeks Sektor wilayah di atas atau di bawah rata-rata	-	-	-	√

Sumber: Hasil Kajian

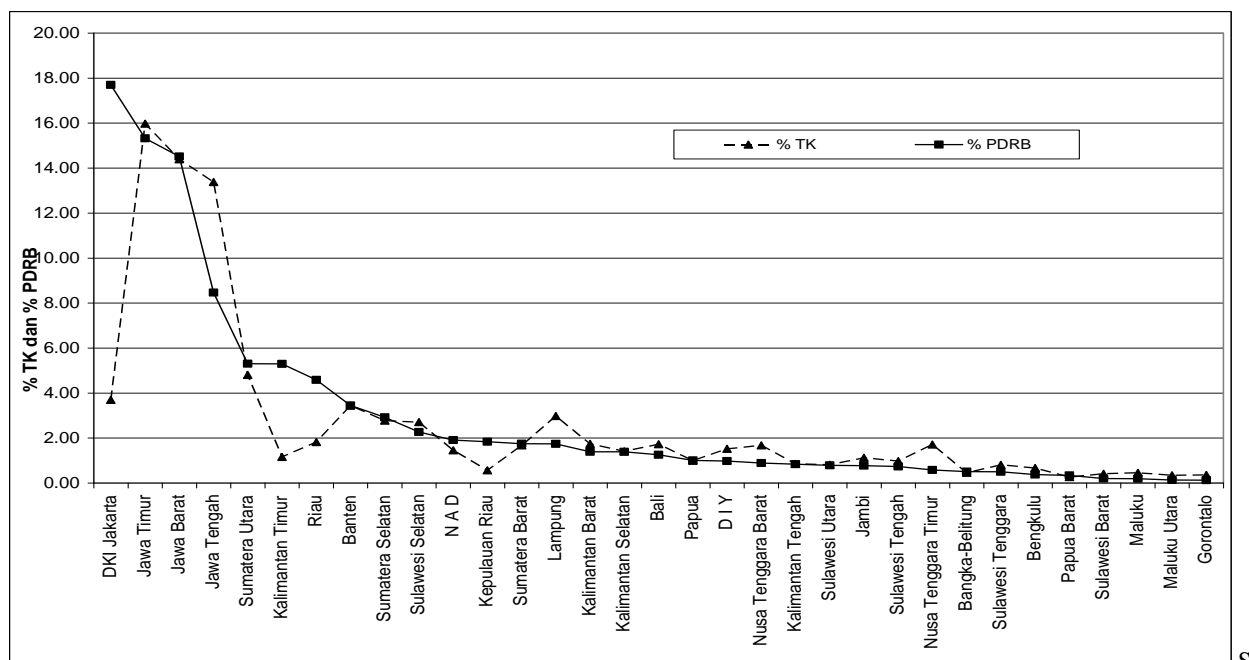
DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari BPS berupa PDRB harga konstan tahun dasar 2000 dan Tenaga Kerja. Data-data tersebut terbagi atas 9 sektor dan 33 provinsi di seluruh Indonesia. Sedangkan periode tahun yang digunakan adalah sebanyak empat tahun yaitu tahun 2004, 2006, 2008 dan 2010.

PEMBAHASAN

Sumbangan Ekonomi (PDRB) dan Tenaga Kerja (TK) dari tiap provinsi di Indonesia sampai dewasa ini tidak merata. Berdasarkan Gambar 4 yang menggunakan data rata-rata tahun 2004, 2006, 2008 serta 2010, menunjukkan bahwa sumbangan ekonomi dan TK dari berbagai

wilayah provinsi diseluruh Indonesia dapat dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu: (i) Kelompok yang terdiri dari 4 provinsi, yaitu Provinsi Jakarta sampai dengan Jawa Tengah, dengan sumbangan ekonomi 55.99% dan TK 47,43%. (ii) Kelompok yang terdiri dari 6 provinsi yaitu Provinsi Sumatra Utara sampai dengan Sulawesi Selatan, dengan sumbangan ekonomi 25,82% dan TK 16,69%. (iii) Kelompok yang terdiri dari 8 provinsi yaitu Provinsi NAD sampai dengan Papua dengan sumbangan ekonomi 12,26% dan TK 12,53. (iv) Kelompok yang terdiri dari 15 provinsi yaitu Provinsi DIY sampai dengan Gorontalo, dengan sumbangan ekonomi 7,93% dan TK 12,41%.



umber: BPS, diolah.

Gambar 4: Rata-Rata Sebaran Sumbangan PDRB dan Tenaga kerja Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2004, 2006, 2008 dan 2010.

Jika dicermati terhadap gambaran data dari keempat kelompok provinsi tersebut memperlihatkan keadaan yang cukup menarik, dimana terjadi hubungan terbalik antara jumlah kelompok provinsi terhadap sumbangan ekonomi dan TK yang diberikan. Pada kelompok provinsi yang berjumlah sedikit memberikan sumbangan ekonomi dan TK yang sangat banyak, sebaliknya pada kelompok provinsi yang berjumlah banyak justru hanya memberikan sumbangan ekonomi dan TK yang sedikit. Pada sisi lainnya juga terlihat, bahwa kuantitas TK pada setiap Provinsi berbanding lurus dengan kuantitas PDRB. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa, secara umum pembangunan ekonomi di Indonesia tidak merata dan masih bersifat padat karya³. Permasalahan ini tentunya sangat perlu diperhatikan mengingat penggerak ekonomi utama di Indonesia masih terjadi pada Sektor Konstruksi Bangunan, serta Sektor Perdagangan Hotel dan

³ Hasil penelitian Canon (2007) di Provinsi Sulawesi Utara (sekarang Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo) menunjukkan bahwa peningkatan populasi di Provinsi ini dalam jangka pendek berpengaruh negatif, namun dalam jangka panjang memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi.

Restoran, sedangkan Sektor Industri Pengolahan belum maksimal⁴. Padahal Indonesia terkenal kaya dengan sektor-sektor primer yang tentunya perlu sentuhan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah ekonominya. Namun, karena masih minimnya jumlah industri pengolahan sektor primer di Indonesia sehingga bahan baku yang berasal dari sektor tersebut lebih banyak menjadi komoditas ekspor. Tentunya hal ini berakibat pada hilangnya peluang peningkatan nilai tambah ekonomi Indonesia, karena berpindah ke negara lain. Disamping itu dengan minimnya industri pengolahan berbahan baku produk pertanian, maka berdampak terhadap terhambatnya upaya perpindahan tenaga kerja dari Sektor Pertanian ke Sektor Industri Pengolahan berbahan baku pertanian. Padahal tenaga kerja pada sektor Industri pengolahan jauh lebih baik tingkat produktivitasnya dari pada tenaga kerja sektor pertanian. Untuk itu perlu dikembangkan analisis ekonomi dari sisi produksi untuk mendukung analisis ekonomi dari sisi konsumsi yang telah sangat berkembang, sehingga program pembangunan nasional berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan harapan.

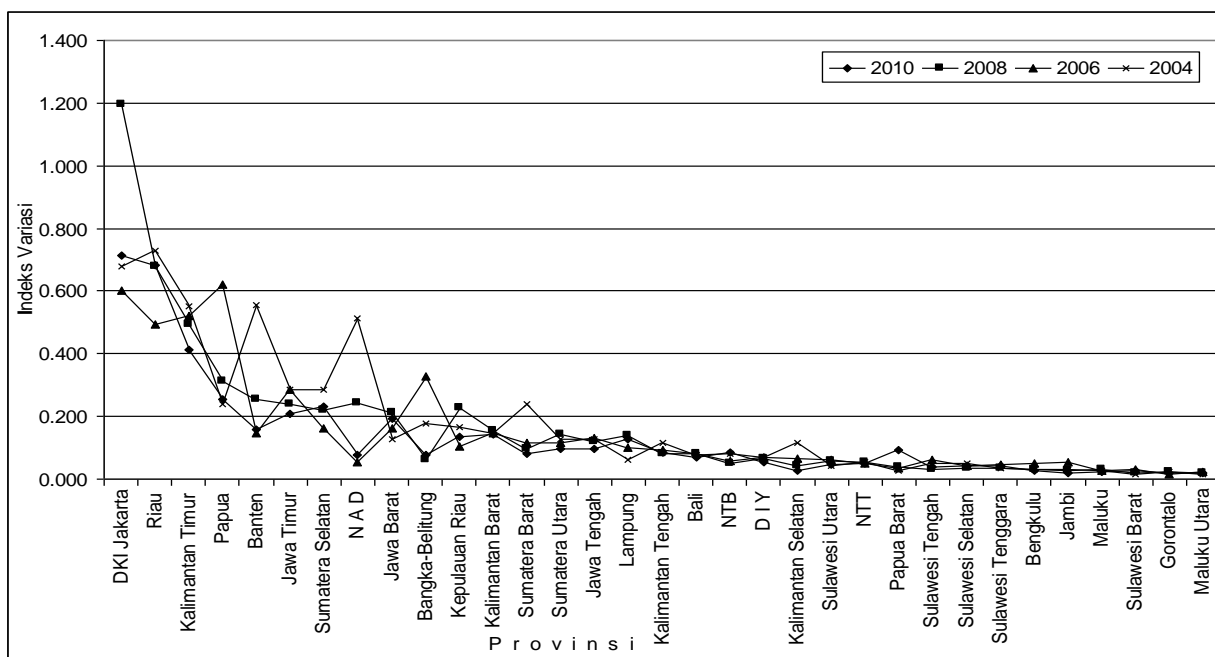
Untuk membuat perencanaan yang matang dan tepat guna maka diperlukan analisis-analisis yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pijakan pembuatan program pembangunan ekonomi ke depan. Salah satu analisis yang dapat menggambarkan keadaan variasi pendapatan tenaga kerja adalah Matriks Indeks Variasi Pendapatan (MIVP). MIVP menampilkan indeks variasi pendapatan tenaga kerja menurut provinsi, menurut sektor dan menurut sektor provinsi. Hasil perhitungan MIVP yang digabungkan Indeks Produktivitas Tenaga Kerja (IPTK), cukup menarik untuk diangkat dalam tulisan ini.

Perkembangan MIVP tenaga kerja menurut provinsi di Indonesia selama periode tahun 2004, 2006, 2008 dan 2010 adalah cukup bervariasi dan sangat tinggi. Berdasarkan MIVP total Indonesia adalah sebagai berikut: tahun 2004 sebesar 1.53, tahun 2006 turun menjadi 1.29, namun tahun 2008 meningkat menjadi 1.64 dan tahun 2010 turun kembali menjadi 1,23. Diperkirakan peningkatan indeks variasi tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2008 diakibatkan oleh krisis global yang juga melanda Indonesia. Namun krisis global tidak mempengaruhi kesenjangan pendapatan tenaga kerja di Indonesia dalam waktu lama, karena pada tahun 2010 nilainya turun kembali dan bahkan lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, dari perhitungan MIVP menurut provinsi di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa walaupun terjadi perubahan nilai indeks variasi selama periode waktu tersebut tapi pada dasarnya tidak merubah pola nilai indeks variasi yang terjadi.

Hal ini dibuktikan oleh MIVP berdasarkan wilayah (Gambar 5) yang diurutkan dari nilai terbesar sampai ke yang terkecil selama beberapa periode waktu. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa pada urutan provinsi-provinsi dengan indeks variasi positif tertinggi terjadi pola

⁴ Dengan menggunakan analisis sektor katalisator (Canon, 2010), maka urutan kelompok sektor katalisator di Indonesia adalah sebagai berikut: 1) empat kombinasi sektor lainnya meliputi Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, Sektor Bangunan dan Konstruksi. 2) dua kombinasi sektor lainnya meliputi Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik Gas dan Air Bersih, Sektor Perhubungan dan Komunikasi, Sektor Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Sektor Jasa-Jasa, 3) nol kombinasi sektor lainnya meliputi Sektor Pertanian, serta Sektor Pertambangan dan Pengalihan.

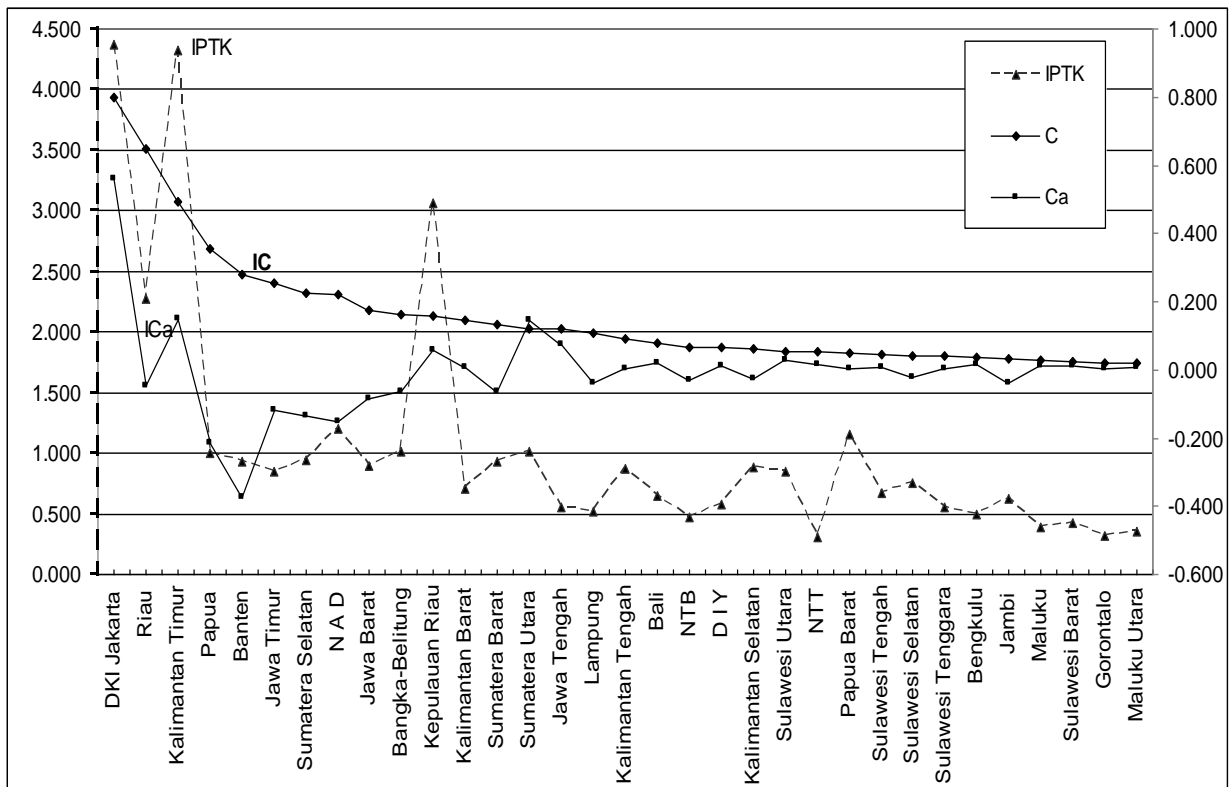
penurunan drastis indeks variasinya, namun pada urutan provinsi dengan indeks variasi positif menengah sampai rendah terjadi pola penurunan indeks variasi yang landai. Berdasarkan urutan tersebut Provinsi Jakarta, Provinsi Riau, dan Provinsi Kalimantan Timur memberikan andil yang paling besar terhadap terjadinya kesenjangan pendapatan tenaga kerja di Indonesia. Sedangkan Provinsi yang relatif kurang mempengaruhi peningkatan kesenjangan pendapatan di Indonesia adalah Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara. Berdasarkan Gambar 4 dan Gambar 5 terlihat bahwa besarnya nilai indeks variasi positif menurut provinsi mempunyai hubungan dengan besarnya sumbangan PDRBnya terhadap perekonomian Indonesia. Atau dengan kata lain besarnya indeks variasi positif yang disumbangkan oleh suatu provinsi berbanding lurus dengan besarnya persentasi PDRB dan persentasi tenaga kerja.



Sumber: BPS, diolah.

Gambar 5: Perkembangan Matriks Indeks Variasi Pendapatan (MIVP) seluruh provinsi di Indonesia Tahun 2004, 2006, 2008, dan 2010.

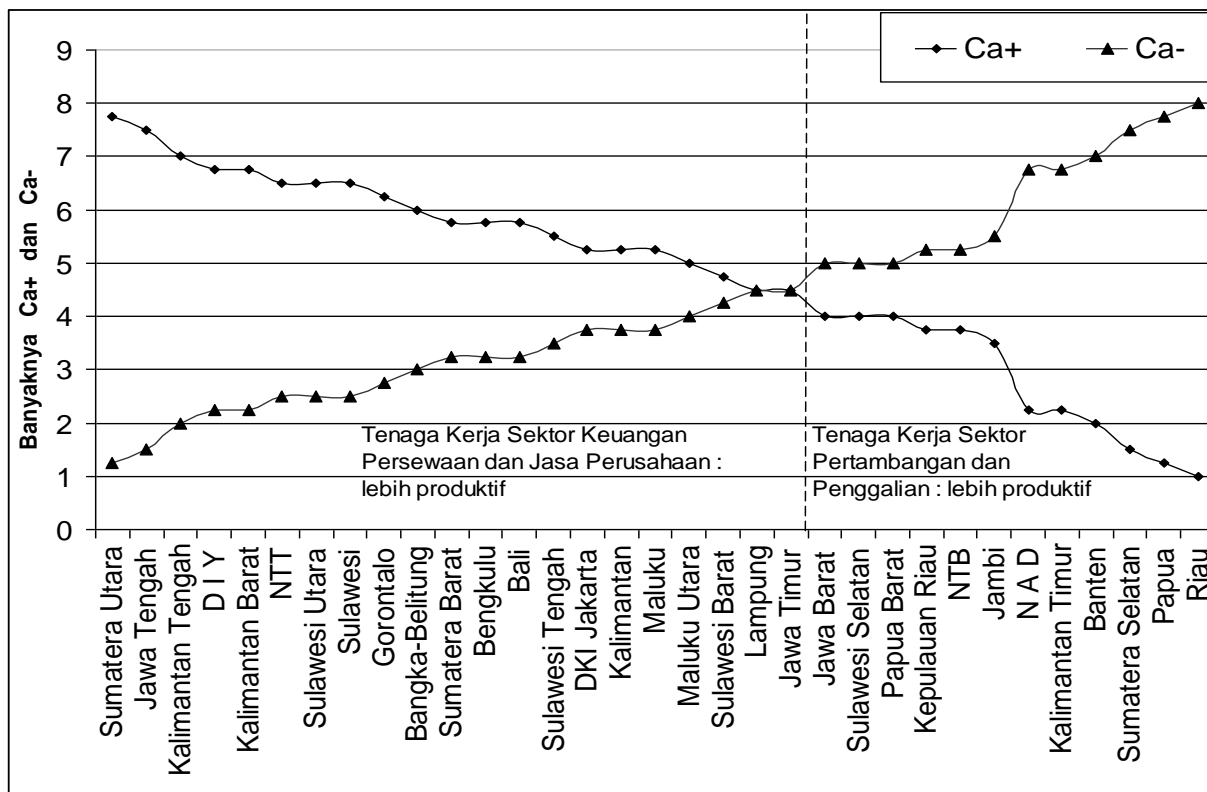
Disisi lain pada Gambar 6 ditampilkan Indeks Variasi positif (IC), Indeks Variasi Positif/Negatif (ICa) dan Indeks Produktivitas Tenaga Kerja (IPTK) Seluruh Provinsi di Indonesia yang diambil dari nilai rata-rata Tahun 2004, 2006, 2008, dan 2010. Pada gambar tersebut terlihat bahwa terjadi suatu pola kecenderungan, dimana semakin kecil nilai IC maka nilai ICa semakin tidak berfluktuatif, sedangkan semakin besar nilai IC maka semakin berfluktuatif nilai ICa. Kemudian, pada provinsi yang mempunyai IC yang tinggi dan mempunyai nilai ICa yang positif menunjukkan bahwa tingginya nilai IC tersebut disebabkan oleh tarikan pendapatan di atas rata-rata yang cukup besar seperti yang terjadi pada Provinsi Jakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Riau serta beberapa provinsi lainnya. Sedangkan provinsi yang mempunyai nilai IC yang tinggi dan mempunyai nilai ICa negatif menunjukkan bahwa tingginya nilai IC tersebut disebabkan oleh tarikan pendapatan di bawah rata-rata yang cukup besar seperti yang terjadi pada Provinsi Papua, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur dan beberapa provinsi lainnya.



Sumber: BPS, diolah.

Gambar 6: Indeks Variasi positif, Indeks Variasi Positif/Negatif dan Produktivitas Tenaga Kerja Seluruh Provinsi di Indonesia Rata-Rata Tahun 2004, 2006, 2008, dan 2010.

Lebih lanjut pada Gambar 7 dibuat urutan rata-rata Provinsi dengan Nilai ICa^+ terbanyak sampai ke yang tersedikit, serta sebaliknya provinsi dengan nilai ICa^- tersedikit sampai ke yang terbanyak. Kedua kumpulan nilai ICa^+ dan ICa^- tersebut dirangking, kemudian secara sendiri-sendiri dihubungkan dalam bentuk grafik *line* sehingga membentuk seperti huruf X. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa sebagian besar provinsi yang memiliki IPTK tertinggi pada Sektor Pertambangan dan Penggalan mendominasi posisi sebelah kanan persilangan huruf "X", sedangkan provinsi yang memiliki IPTK tertinggi pada Sektor Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan mendominasi posisi sebelah kiri persilangan huruf "X". Temuan ini menunjukkan bahwa Sektor Pertambangan dan Penggalan memberikan dampak peningkatan kesenjangan pendapatan, sebaliknya Sektor Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan memberikan dampak terhadap penurunan tingkat kesenjangan pendapatan tenaga kerja dalam wilayah. Hal ini dapat dipahami mengingat Sektor Pertambangan dan Penggalan tidak menjadi kelompok sektor katalisator, sedangkan Sektor Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan masuk dalam kelompok sektor katalisator di Indonesia.



Sumber: BPS, diolah.

Gambar 7 : Perbandingan Antara Nilai Ca+ dan Ca- Rata-Rata Setiap Provinsi.

Pada Gambar 6 serta Tabel 5 secara umum dapat dijelaskan bahwa Provinsi Jakarta, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Riau merupakan provinsi-provinsi dengan tingkat produktivitas TK paling tinggi dan mempunyai andil terbesar terhadap terbentuknya kesenjangan pendapatan TK di Indonesia. Namun jika dilihat dalam wilayahnya sendiri seperti pada Provinsi Jakarta dan Kalimantan Timur pendapatan yang besar lebih banyak diterima oleh kelompok menengah ke atas, sedangkan Provinsi Riau relatif lebih merata. Sama halnya dengan ketiga provinsi lainnya, Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tingkat produktivitas TK paling tinggi, namun provinsi ini hanya memberikan pengaruh yang rendah terhadap terjadinya kesenjangan di Indonesia, dan juga pendapatan rata-rata TK dalam wilayahnya sendiri relatif lebih merata. Lain halnya dengan Provinsi NAD wilayah ini memberikan pengaruh kesenjangan pendapatan TK dengan tingkat yang sedang, dan tingkat produktivitas TK-nya yang produktif, namun lebih banyak TK yang memperoleh pendapatan di bawah tingkat rata-rata. Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Papua Barat merupakan wilayah dengan keadaan TK yang produktif dengan sumbangan terhadap terjadinya tingkat kesenjangan pendapatan TK di Indonesia dari rendah sampai sangat rendah. Akan tetapi kalau dilihat dari keadaan TK dalam provinsi sendiri, hanya Provinsi Sumatra Utara mempunyai tingkat pendapatan TK lebih banyak di atas rata, sedangkan untuk Provinsi Bangka Belitung lebih tersebar merata.

Terdapat tiga kelompok Provinsi yang mempunyai TK hampir produktif: Kelompok pertama terdiri dari Provinsi Papua, Sumatra Selatan, Banten, dan Jawa Timur. Kelompok kedua terdiri dari Sumatra Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Lampung. Kelompok Ketiga terdiri dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,

Sulawesi Tengah, Bali, Jambi, DIY, dan Sulawesi Tenggara. Kelompok provinsi pertama memberikan pengaruh yang sedang terhadap terjadinya tingkat kesenjangan TK di Indonesia, dan di dalam wilayahnya sendiri banyak TK yang menerima pendapatan di bawah rata-rata. Kelompok provinsi kedua dan kelompok provinsi ketiga hanya memberikan pengaruh yang sangat rendah terhadap terjadinya kesenjangan pendapatan di Indonesia, disamping itu dalam wilayah masing-masing provinsi ini pendapatan TK relatif merata.

Terakhir hanya tujuh provinsi yang masuk dalam kelompok kurang produktif yaitu Provinsi Bengkulu, NTB, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, dan NTT. Nampaknya kelompok provinsi ini juga punya dua kejadian yang sama, dimana andil mereka terhadap terjadinya kesenjangan pendapatan TK di Indonesia sangat rendah, dan tingkat pendapatan TK di dalam provinsinya relatif merata.

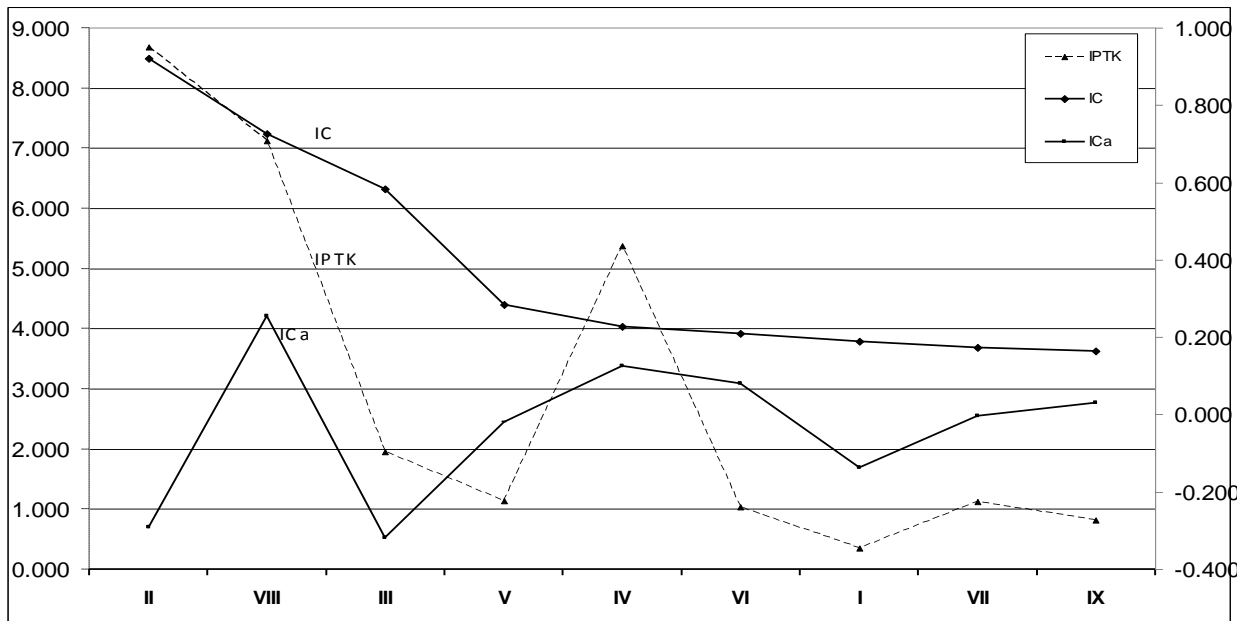
Dengan menggunakan data yang sama, pada Gambar 8 ditampilkan MIVP tenaga kerja menurut sektor. Pada Gambar 8 terlihat terjadi kecenderungan, bahwa semakin kecil nilai IC maka nilai Ica semakin tidak berfluktuatif, sebaliknya semakin besar nilai IC maka semakin berfluktuatif nilai Ica. Tiga Sektor yang menempati urutan produktivitas TK teratas yaitu, (i) Sektor Keuangan Persewaan dan Jasa perusahaan, (ii) Sektor Pertambangan dan Penggalian, serta (iii) Sektor Listrik Gas dan Air Bersih. Sektor pertama dan kedua memberikan andil tingkat kesenjangan yang tinggi, sedangkan sektor yang ketiga hanya memberikan andil yang sedang terhadap terjadinya tingkat kesenjangan pendapatan TK di Indonesia. Disisi lain kalau dilihat dari keadaan pendapatan TK dalam masing-masing sektor, sektor pertama dan ketiga sebagian besar pendapatan TK-nya berada pada tingkat rata-rata ke atas, sedangkan sektor kedua sebagian besar pendapatan TK-nya berada ditingkat rata-rata ke bawah.

Sektor yang menempati posisi TK produktif adalah: (i) Sektor Industri pengolahan, (ii) Sektor Bangunan, (iii) Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, serta (iv) Sektor Perhubungan dan Lomunikasi. Sektor pertama memberikan andil yang besar terhadap terjadinya kesenjangan pendapatan TK, sedangkan sektor kedua sampai keempat memberikan andil yang sedang sampai rendah terhadap terjadinya kesenjangan pendapatan TK di Indonesia. Sedangkan sektor yang masuk dalam golongan hampir produktif serta kurang produktif adalah (i) Sektor Jasa-Jasa, serta Sektor Pertanian. Kedua sektor ini memberikan andil yang paling kecil terhadap terjadinya kesenjangan pendapatan di Indonesia, disamping itu tingkat pendapatan TK yang berada dalam kedua sektor tersebut relatif tersebar merata.

Tabel 5: Perbandingan Antara Indeks Variasi Positif, Indeks Variasi Positif/Negatif dan Indeks Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Provinsi.

No	Wilayah	IC	ICa	IPTK	Keterangan
1	DKI Jakarta, Kalimantan Timur	Tinggi	di atas	sangat produktif	Sumbangan terhadap kesenjangan TK Indonesia tinggi, dengan tingkat pendapatan TK dalam provinsi di atas rata-rata, dengan tingkat produktifitas TK sangat tinggi
2	Riau	Tinggi	merata	sangat produktif	Sumbangan terhadap kesenjangan TK Indonesia tinggi, tingkat pendapatan TK relatif merata, dengan tingkat produktifitas TK sangat tinggi
3	N A D	sedang	di bawah	produktif	Sumbangan terhadap kesenjangan TK Indonesia sedang, tingkat pendapatan TK dalam provinsi di bawah rata-rata, dengan tingkat produktifitas TK tinggi
4	Papua, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Timur	sedang	di bawah	hampir produktif	Sumbangan terhadap kesenjangan TK Indonesia sedang, dengan tingkat pendapatan TK dalam provinsi di bawah rata-rata, namun tingkat produktifitas TK tinggi
5	Kepulauan Riau	rendah	merata	sangat produktif	Sumbangan terhadap kesenjangan TK Indonesia rendah, dengan tingkat pendapatan TK dalam provinsi merata, dengan tingkat produktifitas sangat tinggi
6	Sumatera Utara	rendah	di atas	produktif	Sumbangan terhadap kesenjangan TK Indonesia rendah, di tingkat pendapatan TK dalam provinsi di atas rata-rata, dengan tingkat produktifitas TK produktif
7	Bangka-Belitung	rendah	merata	Produktif	Sumbangan terhadap kesenjangan TK Indonesia rendah, dengan tingkat pendapatan TK dalam provinsi merata, dengan tingkat produktifitas TK produktif
8	Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Lampung.	rendah	merata	hampir produktif	Sumbangan terhadap kesenjangan TK Indonesia rendah, dengan tingkat pendapatan TK dalam provinsi merata, namun tingkat produktifitas yang kurang produktif
9	Papua Barat.	sangat rendah	merata	produktif	Sumbangan terhadap kesenjangan TK Indonesia sangat rendah, dengan tingkat pendapatan TK dalam provinsi merata, dengan tingkat produktifitas yang produktif
10	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, Jambi, DIY, Sulawesi Tenggara.	sangat rendah	merata	hampir produktif	Sumbangan terhadap kesenjangan TK Indonesia sangat rendah, tingkat pendapatan TK dalam provinsi merata, dengan tingkat produktifitas yang kurang produktif
11	Bengkulu, NTB, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, NTT.	sangat rendah	merata	kurang produktif	Sumbangan terhadap kesenjangan TK Indonesia sangat rendah, dengan tingkat pendapatan TK dalam provinsi merata, dengan tingkat produktifitas TK tidak produktif

Sumber: BPS, diolah.



Sumber: BPS, diolah

Gambar 8 : Indeks Variasi positif, Indeks Variasi Positif/Negatif dan Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Sektor Rata-Rata Tahun 2004, 2006, 2008, dan 2010.

Tabel 6 : Perbandingan Antara IC, Ica, dan IPTK Menurut Sektor Ekonomi.

No	Sektor	IC	ICa	IPTK	Keterangan
1	-Keuangan persewaan dan jasa perusahaan	tinggi	di atas	sangat produktif	Sumbangan terhadap kesenjangan TK Indonesia tinggi, dengan tingkat pendapatan TK dalam sektor di atas rata-rata, dan tingkat produktifitas TK sangat produktif
2	-Pertambangan	tinggi	di bawah	sangat produktif	Sumbangan terhadap kesenjangan TK Indonesia tinggi, namun tingkat pendapatan TK dalam sektor di bawah rata-rata, dan tingkat produktifitas TK sangat produktif
3	-Industri Pengolahan	tinggi	di bawah	produktif	Sumbangan terhadap kesenjangan TK Indonesia tinggi, namun tingkat pendapatan TK dalam sektor di bawah rata-rata, dan tingkat produktifitas TK produktif
4	-Listrik, Gas dan Air Bersih	sedang	di atas	sangat produktif	Sumbangan terhadap kesenjangan TK Indonesia sedang, dengan tingkat pendapatan TK dalam sektor di atas rata-rata, dan tingkat produktifitas TK sangat produktif
5	-Bangunan -Perdagangan Hotel dan Restoran	sedang	merata	produktif	Sumbangan terhadap kesenjangan TK Indonesia sedang, dengan tingkat pendapatan TK dalam sektor tersebar merata, dan tingkat produktifitas TK produktif
6	-Perhubungan dan Komunikasi	rendah	merata	produktif	Sumbangan terhadap kesenjangan TK Indonesia rendah, dengan tingkat pendapatan TK dalam sektor tersebar merata, dan tingkat produktifitas TK produktif
7	-Jasa-Jasa	rendah	merata	hampir produktif	Sumbangan terhadap kesenjangan TK Indonesia rendah, dengan tingkat pendapatan TK dalam sektor tersebar merata, namun tingkat produktifitas TK kurang produktif
8	-Pertanian	rendah	merata	kurang produktif	Sumbangan terhadap kesenjangan TK Indonesia rendah, dengan tingkat pendapatan TK dalam sektor tersebar merata, namun tingkat produktifitas TK tidak produktif

KESIMPULAN

1. Besar persentase sumbangan ekonomi hampir seluruh Provinsi di Indonesia sangat sebanding dengan persentase sumbangan tenaga kerja. Untuk Provinsi Jakarta, Kalimantan Timur, Riau, persentase tenaga kerja lebih kecil dari pada persentase ekonomi, dan ketiga provinsi tersebut memberikan andil terbesar terhadap indeks kesenjangan positif total. Untuk Provinsi Jawa Tengah, Lampung, NTB, dan NTT persentase tenaga kerja lebih besar dari pada persentase ekonomi dengan sumbangan terhadap indeks kesenjangan total adalah rendah sampai sangat rendah.
2. Berdasarkan hasil analisis juga dapat disimpulkan bahwa besarnya sumbangan indeks kesenjangan total tiap provinsi dipengaruhi oleh besarnya persentase sumbangan ekonomi. Hal yang sama juga berlaku dimana besarnya sumbangan tiap sektor ekonomi sebanding dengan besarnya sumbangan terhadap indeks kesenjangan positif.
3. Semakin rendah sumbangan suatu provinsi terhadap indeks kesenjangan total, maka semakin merata tingkat pendapatan tenaga kerja yang ada dalam provinsinya, sebaliknya semakin besar sumbangan kesenjangan total dari suatu provinsi maka semakin beragam tingkat pendapatan tenaga kerja yang ada dalam provinsinya.
4. Semakin produktif keadaan tenaga kerja dalam suatu provinsi maka semakin besar sumbangan provinsi tersebut terhadap kesenjangan pendapatan total.
5. Sektor-sektor yang sangat berperan terhadap terjadinya kesenjangan pendapatan di Indonesia adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Industri, sedangkan sektor-sektor yang kurang berperan terhadap terjadinya kesenjangan pendapatan adalah Sektor Pertanian dan Sektor Jasa-Jasa.
6. Pada provinsi yang mempunyai IPTK relatif rendah pada Sektor Pertambangan dan Penggalian akan memberikan dampak peningkatan kesenjangan pendapatan dalam wilayahnya sendiri. Sebaliknya provinsi yang mempunyai IPTK relatif tinggi pada Sektor Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan akan memberikan dampak penurunan kesenjangan pendapatan dalam wilayah sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Deden Rukmana, 1995, Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pengembangan Wilayah Terbelakang, *Jurnal Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kota*, FTSP-ITB, No. 19.
- Esteban, J., 1999, Regional Convergence in Europe And The industry Mix : A Shift-Share Analysis, *Institut d'Análisi Econòmica*, 08183 Bellaterra, Barcelona, Spain.
- Dumairy, 1999, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hoover, Edgar M, 1977, *Pengantar Ekonomi Regional*, LPFE Universitas Indonesia, Jakarta.

Siti S. Nurzaman, 1997, Tinjauan Kesenjangan Wilayah di Indonesia, *Jurnal Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kota*, FTSP-ITB, Vol. 8, No.4.

-----, 2002, *Perencanaan Wilayah di Indonesia (Pada Masa Sekitar krisis)*, Penerbit ITB, Bandung.

Sugeng Budiharsono, 1989, *Perencanaan Pembangunan Wilayah (Teori Model Perencanaan dan Penerapannya)*, IPB, Bogor.

Williamson, Jeffrey G., 1965, Regional Inequality and the Process of National Development: a description of the patterns, *Economic Development and Cultural Change*, vol. XIII, No. 4, Part. 2, The University of Chicago Press 1965

Wikipedia, Gini coefficient, http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient, [27-06-2010].

Jinying Zhao, Eric Boerwinkle, And Momiao Xiong., 2006, Impact of Haplotype-Frequency Estimation Error on Test Statistics in Association Studies, Human Genetics Center University of Texas Health Science Center at Houston, Houston.

Lampiran:

Indeks C

	2010	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Wil.
1	N A D	0.005	0.055	0.037	0.011	0.011	0.003	0.004	0.031	0.013	0.077
2	Sumatera Utara	0.018	0.071	0.027	0.010	0.006	0.008	0.021	0.050	0.010	0.096
3	Sumatera Barat	0.012	0.059	0.010	0.012	0.000	0.005	0.044	0.000	0.029	0.082
4	Riau	0.049	0.628	0.096	0.067	0.074	0.095	0.088	0.173	0.067	0.684
5	Jambi	0.004	0.001	0.005	0.004	0.009	0.005	0.008	0.004	0.008	0.018
6	Sumatera Selatan	0.066	0.188	0.052	0.026	0.014	0.050	0.058	0.049	0.035	0.230
7	Bengkulu	0.008	0.010	0.017	0.000	0.005	0.007	0.007	0.009	0.012	0.028
8	Lampung	0.015	0.095	0.036	0.001	0.011	0.007	0.003	0.073	0.002	0.127
9	Bangka-Belitung	0.022	0.072	0.017	0.001	0.009	0.015	0.000	0.001	0.003	0.079
10	Kepulauan Riau	0.021	0.019	0.105	0.009	0.005	0.035	0.020	0.065	0.029	0.136
11	DKI Jakarta	0.074	0.236	0.261	0.012	0.227	0.037	0.104	0.562	0.044	0.715
12	Jawa Barat	0.012	0.083	0.000	0.116	0.061	0.000	0.069	0.091	0.022	0.194
13	Jawa Tengah	0.025	0.081	0.006	0.027	0.010	0.029	0.007	0.003	0.025	0.098
14	D I Y	0.005	0.038	0.030	0.010	0.005	0.004	0.017	0.011	0.014	0.056
15	Jawa Timur	0.016	0.126	0.093	0.075	0.063	0.095	0.000	0.003	0.004	0.208
16	Banten	0.006	0.089	0.019	0.101	0.026	0.005	0.004	0.071	0.021	0.157
17	Bali	0.011	0.033	0.037	0.014	0.009	0.032	0.026	0.002	0.017	0.070
18	Nusa Tenggara Barat	0.007	0.055	0.060	0.009	0.002	0.008	0.010	0.003	0.002	0.083
19	Nusa Tenggara Timur	0.006	0.033	0.021	0.001	0.006	0.014	0.005	0.008	0.024	0.050
20	Kalimantan Barat	0.007	0.130	0.030	0.000	0.011	0.020	0.024	0.027	0.009	0.141
21	Kalimantan Tengah	0.012	0.077	0.009	0.000	0.002	0.012	0.010	0.026	0.012	0.085
22	Kalimantan Selatan	0.016	0.008	0.015	0.001	0.002	0.002	0.014	0.002	0.002	0.028
23	Kalimantan Timur	0.036	0.270	0.261	0.046	0.052	0.058	0.026	0.119	0.076	0.414
24	Sulawesi Utara	0.006	0.028	0.013	0.000	0.030	0.006	0.012	0.008	0.012	0.048
25	Sulawesi Tengah	0.018	0.020	0.019	0.003	0.004	0.003	0.005	0.010	0.016	0.039
26	Sulawesi Selatan	0.001	0.017	0.031	0.002	0.017	0.017	0.008	0.004	0.003	0.044
27	Sulawesi Tenggara	0.007	0.033	0.014	0.001	0.008	0.005	0.002	0.016	0.003	0.041
28	Gorontalo	0.002	0.015	0.008	0.001	0.001	0.000	0.001	0.011	0.004	0.021
29	Sulawesi Barat	0.007	0.010	0.011	0.001	0.002	0.001	0.004	0.018	0.004	0.025
30	Maluku	0.004	0.011	0.006	0.002	0.003	0.013	0.005	0.009	0.008	0.023
31	Maluku Utara	0.004	0.012	0.007	0.003	0.003	0.012	0.001	0.005	0.000	0.020
32	Papua Barat	0.008	0.032	0.085	0.007	0.009	0.005	0.001	0.011	0.003	0.093
33	Papua	0.042	0.204	0.118	0.021	0.008	0.050	0.024	0.058	0.015	0.254
	Total	0.139	0.836	0.451	0.197	0.266	0.181	0.182	0.629	0.139	1.229

Indeks Ca

	2010	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Jumlah
1	N A D	0.005	0.055	-0.037	-0.011	-0.011	0.003	-0.004	-0.031	0.013	-0.018
2	Sumatera Utara	0.018	-0.071	0.027	0.010	0.006	0.008	0.021	0.050	0.010	0.078
3	Sumatera Barat	0.012	-0.059	-0.010	0.012	0.000	0.005	0.044	0.000	0.029	0.033
4	Riau	-0.049	0.628	-0.096	-0.067	-0.074	-0.095	-0.088	-0.173	-0.067	-0.082
5	Jambi	-0.004	-0.001	-0.005	0.004	-0.009	-0.005	-0.008	0.004	-0.008	-0.032
6	Sumatera Selatan	-0.066	0.188	-0.052	-0.026	-0.014	-0.050	-0.058	-0.049	-0.035	-0.162
7	Bengkulu	0.008	-0.010	-0.017	0.000	-0.005	0.007	0.007	0.009	0.012	0.010
8	Lampung	0.015	-0.095	-0.036	-0.001	-0.011	-0.007	0.003	0.073	-0.002	-0.060
9	Bangka-Belitung	0.022	-0.072	0.017	0.001	0.009	0.015	0.000	-0.001	0.003	-0.006
10	Kepulauan Riau	0.021	0.019	0.105	-0.009	0.005	0.035	-0.020	-0.065	-0.029	0.063
11	DKI Jakarta	-0.074	-0.236	-0.261	0.012	0.227	0.037	0.104	0.562	0.044	0.415
12	Jawa Barat	0.012	-0.083	0.000	0.116	-0.061	0.000	-0.069	-0.091	-0.022	-0.198
13	Jawa Tengah	0.025	-0.081	0.006	0.027	-0.010	0.029	0.007	0.003	0.025	0.031
14	DIY	0.005	-0.038	-0.030	0.010	0.005	0.004	0.017	0.011	0.014	-0.001
15	Jawa Timur	-0.016	-0.126	-0.093	0.075	-0.063	0.095	0.000	-0.003	0.004	-0.127
16	Banten	-0.006	-0.089	-0.019	0.101	-0.026	-0.005	-0.004	-0.071	-0.021	-0.139
17	Bali	0.011	-0.033	-0.037	0.014	-0.009	0.032	0.026	0.002	0.017	0.024
18	Nusa Tenggara Barat	-0.007	0.055	-0.060	-0.009	-0.002	-0.008	-0.010	0.003	-0.002	-0.039
19	Nusa Tenggara Timur	0.006	-0.033	-0.021	0.001	0.006	0.014	0.005	0.008	0.024	0.010
20	Kalimantan Barat	-0.007	-0.130	0.030	0.000	0.011	0.020	0.024	0.027	0.009	-0.015
21	Kalimantan Tengah	0.012	-0.077	-0.009	0.000	0.002	0.012	0.010	0.026	0.012	-0.013
22	Kalimantan Selatan	0.016	-0.008	-0.015	0.001	0.002	-0.002	0.014	-0.002	0.002	0.007
23	Kalimantan Timur	-0.036	0.270	0.261	-0.046	-0.052	-0.058	-0.026	-0.119	-0.076	0.120
24	Sulawesi Utara	0.006	-0.028	-0.013	0.000	0.030	0.006	0.012	0.008	0.012	0.033
25	Sulawesi Tengah	0.018	-0.020	-0.019	0.003	0.004	-0.003	0.005	0.010	0.016	0.015
26	Sulawesi Selatan	-0.001	0.017	-0.031	0.002	-0.017	-0.017	-0.008	0.004	0.003	-0.048
27	Sulawesi Tenggara	0.007	-0.033	-0.014	0.001	0.008	0.005	0.002	0.016	0.003	-0.004
28	Gorontalo	0.002	-0.015	-0.008	0.001	0.001	0.000	0.001	0.011	0.004	-0.002
29	Sulawesi Barat	0.007	-0.010	-0.011	-0.001	-0.002	-0.001	-0.004	0.018	0.004	0.001
30	Maluku	0.004	-0.011	-0.006	-0.002	-0.003	0.013	0.005	0.009	0.008	0.017
31	Maluku Utara	0.004	-0.012	0.007	-0.003	-0.003	0.012	0.001	0.005	0.000	0.010
32	Papua Barat	-0.008	-0.032	0.085	-0.007	0.009	-0.005	-0.001	-0.011	-0.003	0.029
33	Papua	-0.042	0.204	-0.118	-0.021	-0.008	-0.050	-0.024	-0.058	-0.015	-0.131
	Total	-0.078	0.036	-0.479	0.187	-0.055	0.047	-0.013	0.184	-0.011	-0.182

Indeks Produktivitas sektor dalam suatu wilayah

	2010	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	N A D	0.556	14.921	1.700	1.856	1.221	1.166	1.467	2.425	1.118
2	Sumatera Utara	0.502	2.242	2.745	4.123	1.381	0.937	1.657	6.314	0.794
3	Sumatera Barat	0.500	2.239	1.881	4.824	1.196	0.894	2.624	3.983	1.231
4	Riau	0.343	23.554	2.074	0.668	0.757	0.526	0.606	1.182	0.388
5	Jambi	0.527	9.938	3.204	6.371	1.256	1.137	1.450	7.215	0.687
6	Sumatera Selatan	0.322	27.201	3.609	2.789	2.293	1.039	1.163	5.821	0.795
7	Bengkulu	0.650	4.375	0.781	3.296	0.739	1.315	2.093	6.992	1.509
8	Lampung	0.715	0.992	1.646	3.555	1.080	0.931	1.798	15.003	0.781
9	Bangka-Belitung	0.844	0.920	2.073	1.874	1.313	0.976	0.704	2.293	0.488
10	Kepulauan Riau	0.560	4.686	2.397	1.178	0.841	0.804	0.452	1.091	0.109
11	DKI Jakarta	0.007	0.524	0.888	2.389	2.056	0.675	1.283	5.996	0.577
12	Jawa Barat	0.459	3.819	2.380	9.537	0.617	0.881	0.623	2.301	0.514
13	Jawa Tengah	0.506	1.368	1.973	5.540	0.875	0.993	1.188	3.663	0.873
14	D I Y	0.480	0.765	1.070	6.357	1.489	0.931	2.287	5.085	1.127
15	Jawa Timur	0.359	3.218	1.878	8.345	0.641	1.505	1.401	4.627	0.763
16	Banten	0.333	0.199	2.161	13.983	0.624	0.837	1.239	1.675	0.354
17	Bali	0.511	0.852	0.738	5.355	0.603	1.468	2.398	3.638	1.074
18	Nusa Tenggara Barat	0.437	16.569	0.498	1.718	1.757	0.974	1.287	6.992	0.920
19	Nusa Tenggara Timur	0.561	0.719	0.241	3.764	2.150	2.066	1.939	6.931	2.600
20	Kalimantan Barat	0.401	0.589	4.487	3.711	2.184	1.638	2.979	8.758	1.133
21	Kalimantan Tengah	0.569	2.265	1.800	2.982	1.363	1.199	1.823	7.490	1.054
22	Kalimantan Selatan	0.568	5.466	1.532	2.874	1.199	0.713	1.700	3.610	0.629
23	Kalimantan Timur	0.184	8.349	4.373	0.836	0.597	0.426	0.836	1.621	0.125
24	Sulawesi Utara	0.459	3.341	1.475	2.806	2.472	0.950	1.606	4.596	0.929
25	Sulawesi Tengah	0.728	3.998	1.283	4.263	1.595	0.813	1.645	6.021	1.315
26	Sulawesi Selatan	0.525	10.564	2.281	4.584	1.194	0.898	1.518	6.218	0.994
27	Sulawesi Tenggara	0.593	2.911	1.490	3.637	2.095	1.194	1.524	8.065	0.890
28	Gorontalo	0.593	0.889	1.091	4.101	1.625	0.935	1.583	10.703	1.285
29	Sulawesi Barat	0.773	2.824	1.491	2.900	1.304	0.992	0.906	13.709	1.260
30	Maluku	0.541	0.949	0.958	1.294	0.447	2.140	1.950	7.982	1.393
31	Maluku Utara	0.589	2.234	4.076	0.888	0.425	2.430	1.285	6.806	0.574
32	Papua Barat	0.365	5.521	9.775	1.774	2.306	0.884	1.586	3.479	0.717
33	Papua	0.289	37.249	0.362	1.370	2.519	0.516	1.702	3.510	1.036
	Sektor	0.382	9.239	2.162	6.187	1.400	1.255	1.496	8.382	0.979

Indeks Produktivitas wilayah dalam suatu sektor

	2010	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Wil
1	N A D	1.327	1.474	0.718	0.274	0.796	0.848	0.895	0.264	1.043	0.913
2	Sumatera Utara	1.245	0.230	1.206	0.633	0.937	0.709	1.052	0.715	0.770	0.949
3	Sumatera Barat	1.221	0.226	0.812	0.728	0.797	0.664	1.637	0.443	1.174	0.933
4	Riau	1.978	5.626	2.116	0.238	1.193	0.924	0.894	0.311	0.875	2.207
5	Jambi	0.807	0.630	0.867	0.603	0.525	0.530	0.567	0.504	0.411	0.585
6	Sumatera Selatan	0.769	2.689	1.524	0.412	1.496	0.756	0.710	0.634	0.742	0.913
7	Bengkulu	0.851	0.237	0.181	0.267	0.264	0.525	0.701	0.418	0.772	0.501
8	Lampung	0.939	0.054	0.382	0.289	0.388	0.373	0.604	0.899	0.401	0.502
9	Bangka-Belitung	2.009	0.091	0.873	0.276	0.854	0.708	0.429	0.249	0.454	0.910
10	Kepulauan Riau	3.833	1.327	2.901	0.498	1.572	1.675	0.791	0.341	0.290	2.617
11	DKI Jakarta	0.078	0.234	1.699	1.597	6.075	2.223	3.547	2.959	2.440	4.136
12	Jawa Barat	1.118	0.385	1.025	1.436	0.411	0.654	0.388	0.256	0.489	0.931
13	Jawa Tengah	0.766	0.086	0.529	0.519	0.362	0.459	0.461	0.253	0.517	0.580
14	D I Y	0.729	0.048	0.287	0.597	0.618	0.431	0.889	0.353	0.669	0.581
15	Jawa Timur	0.841	0.313	0.779	1.210	0.411	1.076	0.840	0.495	0.700	0.897
16	Banten	0.711	0.018	0.816	1.845	0.364	0.544	0.676	0.163	0.295	0.816
17	Bali	0.835	0.058	0.213	0.541	0.269	0.731	1.002	0.271	0.686	0.625
18	Nusa Tenggara Barat	0.526	0.827	0.106	0.128	0.578	0.358	0.397	0.384	0.434	0.461
19	Nusa Tenggara Timur	0.437	0.023	0.033	0.181	0.458	0.490	0.386	0.246	0.792	0.298
20	Kalimantan Barat	0.743	0.045	1.470	0.425	1.105	0.925	1.411	0.740	0.820	0.709
21	Kalimantan Tengah	1.340	0.221	0.750	0.434	0.877	0.860	1.098	0.805	0.970	0.901
22	Kalimantan Selatan	1.280	0.510	0.611	0.401	0.739	0.490	0.980	0.371	0.554	0.862
23	Kalimantan Timur	1.761	3.306	7.398	0.494	1.560	1.243	2.045	0.707	0.466	3.658
24	Sulawesi Utara	1.152	0.348	0.656	0.436	1.697	0.727	1.031	0.527	0.912	0.961
25	Sulawesi Tengah	1.370	0.311	0.427	0.496	0.820	0.466	0.791	0.517	0.967	0.720
26	Sulawesi Selatan	1.052	0.877	0.809	0.568	0.654	0.549	0.778	0.569	0.779	0.767
27	Sulawesi Tenggara	0.884	0.180	0.393	0.335	0.854	0.543	0.581	0.549	0.519	0.571
28	Gorontalo	0.513	0.032	0.167	0.219	0.384	0.246	0.350	0.422	0.434	0.330
29	Sulawesi Barat	0.913	0.138	0.311	0.212	0.421	0.357	0.274	0.739	0.582	0.452
30	Maluku	0.502	0.037	0.157	0.074	0.113	0.606	0.463	0.338	0.506	0.355
31	Maluku Utara	0.557	0.087	0.682	0.052	0.110	0.700	0.311	0.294	0.212	0.362
32	Papua Barat	1.284	0.804	6.080	0.386	2.216	0.947	1.426	0.558	0.985	1.345
33	Papua	0.576	3.069	0.128	0.169	1.370	0.313	0.866	0.319	0.806	0.761

Indeks C

	2008	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Wil.
1	N A D	0.050	0.171	0.112	0.029	0.041	0.044	0.035	0.095	0.004	0.243
2	Sumatera Utara	0.010	0.099	0.076	0.010	0.020	0.025	0.031	0.043	0.015	0.141
3	Sumatera Barat	0.006	0.076	0.004	0.010	0.003	0.016	0.048	0.006	0.032	0.098
4	Riau	0.098	0.628	0.085	0.052	0.073	0.094	0.084	0.153	0.071	0.680
5	Jambi	0.018	0.009	0.012	0.002	0.009	0.006	0.006	0.003	0.007	0.028
6	Sumatera Selatan	0.092	0.176	0.024	0.032	0.003	0.031	0.041	0.054	0.033	0.219
7	Bengkulu	0.006	0.013	0.020	0.001	0.004	0.006	0.009	0.009	0.014	0.032
8	Lampung	0.020	0.123	0.010	0.001	0.001	0.007	0.009	0.055	0.004	0.137
9	Bangka-Belitung	0.027	0.047	0.013	0.002	0.011	0.019	0.000	0.001	0.004	0.060
10	Kepulauan Riau	0.059	0.037	0.122	0.011	0.009	0.002	0.033	0.167	0.051	0.227
11	DKI Jakarta	0.175	0.415	0.373	0.017	0.174	0.040	0.052	1.025	0.055	1.197
12	Jawa Barat	0.019	0.121	0.092	0.108	0.053	0.009	0.040	0.070	0.009	0.211
13	Jawa Tengah	0.021	0.098	0.026	0.026	0.003	0.040	0.015	0.004	0.031	0.120
14	D I Y	0.003	0.046	0.028	0.008	0.010	0.006	0.016	0.026	0.017	0.065
15	Jawa Timur	0.032	0.161	0.074	0.099	0.050	0.107	0.004	0.019	0.003	0.238
16	Banten	0.038	0.156	0.032	0.143	0.047	0.025	0.015	0.118	0.037	0.256
17	Bali	0.005	0.054	0.030	0.015	0.005	0.037	0.027	0.010	0.018	0.082
18	Nusa Tenggara Barat	0.013	0.018	0.044	0.002	0.004	0.002	0.001	0.005	0.002	0.050
19	Nusa Tenggara Timur	0.004	0.040	0.018	0.001	0.006	0.012	0.008	0.009	0.023	0.052
20	Kalimantan Barat	0.009	0.140	0.045	0.000	0.016	0.033	0.020	0.022	0.013	0.155
21	Kalimantan Tengah	0.018	0.072	0.008	0.001	0.006	0.011	0.017	0.018	0.015	0.081
22	Kalimantan Selatan	0.015	0.033	0.002	0.002	0.006	0.005	0.021	0.004	0.005	0.042
23	Kalimantan Timur	0.064	0.289	0.341	0.061	0.057	0.053	0.036	0.151	0.080	0.494
24	Sulawesi Utara	0.012	0.040	0.013	0.006	0.034	0.000	0.012	0.008	0.008	0.058
25	Sulawesi Tengah	0.017	0.006	0.017	0.000	0.004	0.001	0.006	0.004	0.019	0.032
26	Sulawesi Selatan	0.007	0.027	0.003	0.010	0.006	0.006	0.000	0.003	0.011	0.033
27	Sulawesi Tenggara	0.005	0.024	0.013	0.000	0.006	0.004	0.001	0.017	0.006	0.034
28	Gorontalo	0.001	0.017	0.007	0.000	0.002	0.000	0.004	0.013	0.005	0.023
29	Sulawesi Barat	0.008	0.008	0.004	0.001	0.001	0.003	0.002	0.012	0.007	0.018
30	Maluku	0.002	0.020	0.002	0.003	0.004	0.014	0.005	0.013	0.008	0.030
31	Maluku Utara	0.003	0.014	0.006	0.000	0.003	0.010	0.002	0.003	0.001	0.019
32	Papua Barat	0.017	0.003	0.027	0.006	0.018	0.000	0.003	0.011	0.003	0.039
33	Papua	0.041	0.239	0.154	0.027	0.025	0.063	0.028	0.088	0.029	0.312
	Total	0.259	0.955	0.587	0.230	0.228	0.196	0.154	1.083	0.159	1.640

Indeks Ca

	2008	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Jumlah
1	N A D	-0.050	0.171	-0.112	-0.029	-0.041	-0.044	-0.035	-0.095	-0.004	-0.240
2	Sumatera Utara	0.010	-0.099	0.076	0.010	0.020	0.025	0.031	0.043	0.015	0.132
3	Sumatera Barat	0.006	-0.076	0.004	0.010	0.003	0.016	0.048	0.006	0.032	0.050
4	Riau	-0.098	0.628	-0.085	-0.052	-0.073	-0.094	-0.084	-0.153	-0.071	-0.082
5	Jambi	-0.018	0.009	-0.012	0.002	-0.009	-0.006	-0.006	0.003	-0.007	-0.044
6	Sumatera Selatan	-0.092	0.176	-0.024	-0.032	-0.003	-0.031	-0.041	-0.054	-0.033	-0.135
7	Bengkulu	0.006	-0.013	-0.020	0.001	-0.004	0.006	0.009	0.009	0.014	0.008
8	Lampung	0.020	-0.123	-0.010	-0.001	-0.001	0.007	0.009	0.055	0.004	-0.039
9	Bangka-Belitung	0.027	-0.047	0.013	-0.002	0.011	0.019	0.000	-0.001	0.004	0.024
10	Kepulauan Riau	0.059	0.037	0.122	-0.011	-0.009	-0.002	-0.033	-0.167	-0.051	-0.057
11	DKI Jakarta	-0.175	-0.415	-0.373	-0.017	0.174	0.040	0.052	1.025	0.055	0.366
12	Jawa Barat	-0.019	-0.121	0.092	0.108	-0.053	0.009	-0.040	-0.070	-0.009	-0.100
13	Jawa Tengah	0.021	-0.098	0.026	0.026	-0.003	0.040	0.015	0.004	0.031	0.063
14	D I Y	-0.003	-0.046	-0.028	0.008	0.010	0.006	0.016	0.026	0.017	0.005
15	Jawa Timur	-0.032	-0.161	-0.074	0.099	-0.050	0.107	-0.004	-0.019	0.003	-0.131
16	Banten	-0.038	-0.156	-0.032	0.143	-0.047	-0.025	-0.015	-0.118	-0.037	-0.325
17	Bali	0.005	-0.054	-0.030	0.015	-0.005	0.037	0.027	0.010	0.018	0.023
18	Nusa Tenggara Barat	-0.013	0.018	-0.044	-0.002	0.004	0.002	-0.001	0.005	0.002	-0.029
19	Nusa Tenggara Timur	0.004	-0.040	-0.018	0.001	0.006	0.012	0.008	0.009	0.023	0.007
20	Kalimantan Barat	-0.009	-0.140	0.045	0.000	0.016	0.033	0.020	0.022	0.013	0.001
21	Kalimantan Tengah	0.018	-0.072	-0.008	0.001	0.006	0.011	0.017	0.018	0.015	0.005
22	Kalimantan Selatan	0.015	-0.033	-0.002	0.002	0.006	0.005	0.021	-0.004	0.005	0.013
23	Kalimantan Timur	-0.064	0.289	0.341	-0.061	-0.057	-0.053	-0.036	-0.151	-0.080	0.128
24	Sulawesi Utara	-0.012	-0.040	-0.013	0.006	0.034	0.000	0.012	0.008	0.008	0.002
25	Sulawesi Tengah	0.017	-0.006	-0.017	0.000	0.004	-0.001	0.006	0.004	0.019	0.025
26	Sulawesi Selatan	-0.007	-0.027	0.003	0.010	-0.006	-0.006	0.000	0.003	0.011	-0.019
27	Sulawesi Tenggara	0.005	-0.024	-0.013	0.000	0.006	0.004	0.001	0.017	0.006	0.003
28	Gorontalo	-0.001	-0.017	-0.007	0.000	0.002	0.000	0.004	0.013	0.005	0.000
29	Sulawesi Barat	0.008	-0.008	-0.004	-0.001	0.001	0.003	-0.002	0.012	0.007	0.016
30	Maluku	0.002	-0.020	-0.002	-0.003	-0.004	0.014	0.005	0.013	0.008	0.013
31	Maluku Utara	0.003	-0.014	0.006	0.000	-0.003	0.010	0.002	0.003	0.001	0.009
32	Papua Barat	-0.017	-0.003	0.027	-0.006	0.018	0.000	0.003	-0.011	0.003	0.014
33	Papua	-0.041	0.239	-0.154	-0.027	-0.025	-0.063	-0.028	-0.088	-0.029	-0.216
	Total	-0.465	-0.285	-0.328	0.195	-0.072	0.085	-0.017	0.377	-0.001	-0.512

Indeks Produktivitas sektor dalam suatu wilayah

	2008	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	N A D	0.510	35.728	1.547	1.599	1.136	0.908	1.143	1.711	1.249
2	Sumatera Utara	0.507	1.850	3.129	3.848	1.433	0.950	1.499	5.411	0.743
3	Sumatera Barat	0.500	2.051	1.948	4.318	1.101	0.962	2.520	4.074	1.255
4	Riau	0.331	25.853	2.089	1.144	0.698	0.488	0.513	1.427	0.362
5	Jambi	0.515	15.270	2.879	6.231	1.297	1.138	1.488	7.775	0.802
6	Sumatera Selatan	0.323	28.303	3.757	2.355	2.280	1.104	1.073	5.161	0.722
7	Bengkulu	0.715	4.721	0.506	3.713	0.691	1.178	2.133	7.127	1.676
8	Lampung	0.774	0.758	1.751	2.906	1.113	0.966	1.508	11.050	0.774
9	Bangka-Belitung	1.026	1.495	1.404	1.005	1.163	0.926	0.467	1.802	0.439
10	Kepulauan Riau	2.028	8.573	2.998	1.805	0.795	0.639	0.448	0.758	0.095
11	DKI Jakarta	0.004	0.523	0.906	2.460	1.871	0.785	1.146	10.901	0.723
12	Jawa Barat	0.394	3.685	2.693	9.436	0.544	0.820	0.621	2.456	0.552
13	Jawa Tengah	0.541	1.255	1.921	5.541	0.825	0.998	1.144	3.435	0.902
14	D I Y	0.437	0.959	1.085	6.000	1.789	0.996	2.084	7.604	1.331
15	Jawa Timur	0.399	3.219	1.774	10.082	0.619	1.507	1.107	4.142	0.718
16	Banten	0.292	0.193	2.576	22.845	0.528	0.832	1.203	1.636	0.348
17	Bali	0.491	0.560	0.782	5.951	0.691	1.560	2.169	4.270	1.094
18	Nusa Tenggara Barat	0.444	14.048	0.621	3.670	2.054	1.228	1.515	7.189	1.026
19	Nusa Tenggara Timur	0.602	0.674	0.255	3.805	2.001	1.712	2.139	7.270	2.450
20	Kalimantan Barat	0.414	0.456	4.602	3.271	2.076	1.763	2.224	7.313	1.093
21	Kalimantan Tengah	0.695	2.233	1.358	2.742	1.260	0.931	1.777	5.587	1.008
22	Kalimantan Selatan	0.593	4.798	1.564	2.798	1.124	0.714	1.652	2.938	0.600
23	Kalimantan Timur	0.194	9.903	4.575	0.720	0.512	0.416	0.640	1.392	0.120
24	Sulawesi Utara	0.399	5.052	1.818	6.088	3.225	0.973	1.878	6.077	1.022
25	Sulawesi Tengah	0.799	6.409	1.078	2.980	1.365	0.699	1.374	4.515	1.383
26	Sulawesi Selatan	0.542	8.049	2.759	5.758	1.229	0.875	1.347	5.539	1.069
27	Sulawesi Tenggara	0.666	4.374	1.345	3.450	1.729	1.053	1.236	8.295	0.984
28	Gorontalo	0.551	1.095	1.228	3.633	1.927	0.997	2.068	13.066	1.457
29	Sulawesi Barat	0.813	2.366	1.398	2.536	1.229	1.020	0.701	8.952	1.285
30	Maluku	0.536	0.630	1.486	1.159	0.357	2.250	1.739	10.563	1.359
31	Maluku Utara	0.613	2.391	3.342	2.423	0.415	2.065	1.308	5.720	0.626
32	Papua Barat	0.404	11.512	6.380	2.341	3.804	1.175	1.836	3.975	1.120
33	Papua	0.443	42.119	0.211	1.141	1.484	0.346	1.223	1.907	0.613
	Sektor	0.375	9.125	2.153	5.937	1.270	1.162	1.255	7.856	0.896

Indeks Produktivitas wilayah dalam suatu sektor

	2008	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Wil
1	N A D	1.477	4.253	0.781	0.293	0.972	0.849	0.990	0.237	1.513	1.086
2	Sumatera Utara	1.341	0.201	1.440	0.642	1.118	0.810	1.184	0.682	0.821	0.991
3	Sumatera Barat	1.235	0.208	0.837	0.673	0.802	0.766	1.858	0.480	1.295	0.925
4	Riau	2.024	6.489	2.222	0.441	1.259	0.962	0.937	0.416	0.924	2.290
5	Jambi	0.888	1.081	0.863	0.678	0.659	0.633	0.766	0.639	0.578	0.646
6	Sumatera Selatan	0.810	2.918	1.642	0.373	1.689	0.894	0.804	0.618	0.757	0.941
7	Bengkulu	0.941	0.255	0.116	0.309	0.269	0.500	0.839	0.448	0.923	0.493
8	Lampung	1.109	0.045	0.437	0.263	0.470	0.446	0.645	0.755	0.464	0.537
9	Bangka-Belitung	2.836	0.170	0.676	0.176	0.949	0.827	0.386	0.238	0.508	1.037
10	Kepulauan Riau	16.900	2.935	4.349	0.950	1.956	1.719	1.116	0.301	0.329	3.124
11	DKI Jakarta	0.048	0.250	1.833	1.807	6.422	2.945	3.983	6.050	3.517	4.360
12	Jawa Barat	0.956	0.368	1.138	1.447	0.389	0.642	0.450	0.285	0.560	0.910
13	Jawa Tengah	0.809	0.077	0.500	0.523	0.364	0.482	0.511	0.245	0.564	0.561
14	DIY	0.612	0.055	0.264	0.530	0.739	0.450	0.872	0.508	0.779	0.525
15	Jawa Timur	0.888	0.294	0.687	1.417	0.407	1.082	0.736	0.440	0.668	0.834
16	Banten	0.756	0.021	1.160	3.732	0.403	0.694	0.930	0.202	0.377	0.970
17	Bali	0.831	0.039	0.230	0.636	0.345	0.851	1.096	0.345	0.774	0.634
18	Nusa Tenggara Barat	0.540	0.702	0.131	0.282	0.737	0.482	0.551	0.417	0.522	0.456
19	Nusa Tenggara Timur	0.455	0.021	0.034	0.181	0.446	0.417	0.483	0.262	0.774	0.283
20	Kalimantan Barat	0.774	0.035	1.499	0.386	1.146	1.064	1.243	0.653	0.855	0.701
21	Kalimantan Tengah	1.632	0.215	0.555	0.407	0.874	0.706	1.247	0.626	0.990	0.880
22	Kalimantan Selatan	1.349	0.448	0.619	0.402	0.754	0.524	1.122	0.319	0.571	0.852
23	Kalimantan Timur	2.195	4.595	8.997	0.514	1.706	1.517	2.159	0.750	0.568	4.234
24	Sulawesi Utara	0.930	0.484	0.738	0.897	2.220	0.732	1.309	0.676	0.997	0.874
25	Sulawesi Tengah	1.439	0.474	0.338	0.339	0.725	0.406	0.739	0.388	1.041	0.675
26	Sulawesi Selatan	1.061	0.648	0.941	0.712	0.710	0.553	0.788	0.518	0.876	0.734
27	Sulawesi Tenggara	0.997	0.269	0.350	0.326	0.763	0.508	0.553	0.592	0.615	0.561
28	Gorontalo	0.473	0.039	0.183	0.197	0.488	0.276	0.530	0.535	0.523	0.322
29	Sulawesi Barat	0.918	0.110	0.275	0.181	0.409	0.371	0.236	0.482	0.606	0.423
30	Maluku	0.561	0.027	0.270	0.077	0.110	0.759	0.544	0.527	0.594	0.392
31	Maluku Utara	0.567	0.091	0.539	0.142	0.113	0.617	0.362	0.253	0.243	0.347
32	Papua Barat	1.123	1.314	3.085	0.411	3.119	1.053	1.524	0.527	1.301	1.041
33	Papua	1.124	4.390	0.093	0.183	1.111	0.283	0.927	0.231	0.650	0.951

Indeks C

	2006	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Wil.
1	N A D	0.003	0.038	0.020	0.013	0.017	0.020	0.011	0.004	0.003	0.054
2	Sumatera Utara	0.038	0.055	0.067	0.002	0.026	0.020	0.025	0.035	0.036	0.114
3	Sumatera Barat	0.022	0.095	0.024	0.006	0.002	0.012	0.030	0.023	0.037	0.115
4	Riau	0.040	0.451	0.122	0.008	0.057	0.102	0.055	0.088	0.030	0.495
5	Jambi	0.006	0.051	0.005	0.002	0.005	0.005	0.003	0.018	0.001	0.055
6	Sumatera Selatan	0.059	0.124	0.005	0.010	0.003	0.046	0.045	0.045	0.037	0.163
7	Bengkulu	0.012	0.037	0.011	0.003	0.002	0.015	0.012	0.015	0.012	0.048
8	Lampung	0.013	0.057	0.066	0.009	0.012	0.004	0.001	0.043	0.000	0.100
9	Bangka-Belitung	0.022	0.320	0.070	0.000	0.003	0.018	0.002	0.004	0.000	0.329
10	Kepulauan Riau	0.002	0.014	0.091	0.006	0.015	0.038	0.011	0.020	0.022	0.105
11	DKI Jakarta	0.007	0.152	0.123	0.013	0.261	0.049	0.121	0.482	0.088	0.603
12	Jawa Barat	0.047	0.092	0.070	0.081	0.025	0.003	0.036	0.050	0.017	0.163
13	Jawa Tengah	0.037	0.101	0.017	0.013	0.002	0.044	0.011	0.038	0.038	0.131
14	D I Y	0.015	0.058	0.014	0.011	0.002	0.011	0.027	0.004	0.018	0.071
15	Jawa Timur	0.009	0.225	0.062	0.087	0.036	0.128	0.014	0.032	0.022	0.285
16	Banten	0.010	0.091	0.025	0.094	0.007	0.003	0.006	0.053	0.016	0.145
17	Bali	0.019	0.002	0.058	0.001	0.011	0.035	0.025	0.026	0.011	0.081
18	Nusa Tenggara Barat	0.005	0.030	0.048	0.000	0.003	0.002	0.004	0.004	0.002	0.057
19	Nusa Tenggara Timur	0.001	0.017	0.027	0.000	0.005	0.024	0.002	0.012	0.027	0.050
20	Kalimantan Barat	0.008	0.134	0.018	0.001	0.018	0.027	0.019	0.031	0.018	0.145
21	Kalimantan Tengah	0.015	0.085	0.001	0.007	0.007	0.020	0.011	0.006	0.015	0.091
22	Kalimantan Selatan	0.026	0.051	0.016	0.006	0.014	0.001	0.015	0.017	0.007	0.066
23	Kalimantan Timur	0.003	0.132	0.462	0.030	0.018	0.014	0.019	0.188	0.046	0.520
24	Sulawesi Utara	0.009	0.040	0.010	0.003	0.021	0.016	0.001	0.019	0.027	0.060
25	Sulawesi Tengah	0.011	0.014	0.045	0.012	0.011	0.008	0.006	0.035	0.004	0.063
26	Sulawesi Selatan	0.015	0.025	0.007	0.023	0.014	0.009	0.004	0.003	0.010	0.043
27	Sulawesi Tenggara	0.006	0.030	0.026	0.003	0.009	0.004	0.001	0.019	0.007	0.046
28	Gorontalo	0.002	0.009	0.008	0.002	0.003	0.005	0.002	0.006	0.008	0.017
29	Sulawesi Barat	0.011	0.023	0.013	0.000	0.002	0.005	0.002	0.005	0.006	0.030
30	Maluku	0.002	0.011	0.015	0.005	0.004	0.016	0.001	0.004	0.006	0.027
31	Maluku Utara	0.004	0.000	0.019	0.003	0.008	0.002	0.005	0.006	0.002	0.023
32	Papua Barat	0.012	0.021	0.005	0.002	0.008	0.009	0.013	0.009	0.012	0.034
33	Papua	0.157	0.470	0.278	0.064	0.077	0.088	0.079	0.161	0.107	0.620
	Total	0.197	0.847	0.604	0.173	0.287	0.219	0.179	0.566	0.180	1.291

Indeks Ca

	2006	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Jumlah
1	N A D	-0.003	0.038	0.020	-0.013	-0.017	-0.020	-0.011	0.004	0.003	0.001
2	Sumatera Utara	0.038	-0.055	0.067	-0.002	0.026	0.020	0.025	0.035	0.036	0.188
3	Sumatera Barat	0.022	-0.095	0.024	0.006	-0.002	0.012	0.030	0.023	0.037	0.058
4	Riau	-0.040	0.451	-0.122	-0.008	-0.057	-0.102	-0.055	-0.088	-0.030	-0.052
5	Jambi	0.006	-0.051	0.005	0.002	-0.005	0.005	0.003	0.018	0.001	-0.015
6	Sumatera Selatan	-0.059	0.124	0.005	-0.010	0.003	-0.046	-0.045	-0.045	-0.037	-0.110
7	Bengkulu	0.012	-0.037	-0.011	-0.003	0.002	0.015	0.012	0.015	0.012	0.017
8	Lampung	0.013	-0.057	-0.066	0.009	-0.012	0.004	-0.001	0.043	0.000	-0.067
9	Bangka-Belitung	0.022	-0.320	0.070	0.000	0.003	0.018	0.002	-0.004	0.000	-0.208
10	Kepulauan Riau	-0.002	-0.014	0.091	0.006	-0.015	0.038	-0.011	-0.020	-0.022	0.051
11	DKI Jakarta	-0.007	-0.152	-0.123	-0.013	0.261	0.049	0.121	0.482	0.088	0.704
12	Jawa Barat	0.047	-0.092	0.070	0.081	-0.025	0.003	-0.036	-0.050	0.017	0.015
13	Jawa Tengah	0.037	-0.101	0.017	0.013	0.002	0.044	0.011	0.038	0.038	0.099
14	DIY	0.015	-0.058	-0.014	0.011	0.002	0.011	0.027	0.004	0.018	0.015
15	Jawa Timur	0.009	-0.225	-0.062	0.087	-0.036	0.128	0.014	0.032	0.022	-0.030
16	Banten	0.010	-0.091	0.025	0.094	-0.007	0.003	0.006	-0.053	-0.016	-0.028
17	Bali	0.019	0.002	-0.058	-0.001	-0.011	0.035	0.025	-0.026	0.011	-0.003
18	Nusa Tenggara Barat	0.005	0.030	-0.048	0.000	0.003	-0.002	-0.004	-0.004	-0.002	-0.022
19	Nusa Tenggara Timur	0.001	-0.017	-0.027	0.000	0.005	0.024	0.002	0.012	0.027	0.027
20	Kalimantan Barat	0.008	-0.134	0.018	0.001	0.018	0.027	0.019	0.031	0.018	0.006
21	Kalimantan Tengah	0.015	-0.085	0.001	0.007	0.007	0.020	0.011	0.006	0.015	-0.002
22	Kalimantan Selatan	0.026	-0.051	-0.016	-0.006	0.014	-0.001	0.015	0.017	0.007	0.005
23	Kalimantan Timur	-0.003	-0.132	0.462	-0.030	-0.018	-0.014	0.019	-0.188	-0.046	0.049
24	Sulawesi Utara	0.009	-0.040	-0.010	-0.003	0.021	0.016	0.001	0.019	0.027	0.040
25	Sulawesi Tengah	-0.011	-0.014	-0.045	-0.012	0.011	-0.008	0.006	0.035	0.004	-0.034
26	Sulawesi Selatan	0.015	0.025	-0.007	-0.023	-0.014	-0.009	-0.004	0.003	0.010	-0.005
27	Sulawesi Tenggara	0.006	-0.030	-0.026	0.003	0.009	0.004	-0.001	0.019	0.007	-0.008
28	Gorontalo	0.002	-0.009	-0.008	0.002	0.003	0.005	0.002	0.006	0.008	0.009
29	Sulawesi Barat	0.011	-0.023	0.013	0.000	0.002	0.005	-0.002	0.005	0.006	0.017
30	Maluku	0.002	-0.011	-0.015	0.005	-0.004	0.016	0.001	0.004	0.006	0.003
31	Maluku Utara	-0.004	0.000	0.019	-0.003	-0.008	0.002	-0.005	-0.006	-0.002	-0.007
32	Papua Barat	-0.012	-0.021	0.005	0.002	-0.008	-0.009	-0.013	0.009	-0.012	-0.059
33	Papua	-0.157	0.470	-0.278	-0.064	-0.077	-0.088	-0.079	-0.161	-0.107	-0.542
	Total	0.052	-0.775	-0.025	0.136	0.077	0.204	0.085	0.216	0.145	0.114

Indeks Produktivitas sektor dalam suatu wilayah

	2006	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	N A D	0.411	13.016	4.273	1.041	0.667	1.062	0.711	5.353	0.987
2	Sumatera Utara	0.497	3.182	3.231	1.739	1.091	1.070	0.937	4.163	1.092
3	Sumatera Barat	0.527	1.702	3.160	2.628	0.614	1.116	1.361	4.788	1.453
4	Riau	0.294	20.618	2.040	2.371	0.418	0.576	0.373	1.638	0.618
5	Jambi	0.536	5.522	3.760	3.589	0.727	1.533	1.091	8.533	0.924
6	Sumatera Selatan	0.302	26.309	6.129	3.534	1.849	1.443	0.616	5.013	0.819
7	Bengkulu	0.634	1.422	1.020	0.860	0.909	1.917	1.941	7.203	1.365
8	Lampung	0.684	4.966	1.653	8.297	0.730	1.743	1.070	11.627	1.094
9	Bangka-Belitung	0.920	0.426	8.338	2.038	0.878	1.690	0.756	2.756	0.625
10	Kepulauan Riau	0.202	5.105	2.605	2.021	0.313	1.029	0.342	1.866	0.181
11	DKI Jakarta	0.087	1.041	1.003	0.970	1.555	0.616	0.776	3.720	0.568
12	Jawa Barat	0.530	3.744	2.643	5.635	0.389	0.858	0.311	1.812	0.717
13	Jawa Tengah	0.505	1.201	2.134	2.773	0.604	1.260	0.730	4.626	1.083
14	D I Y	0.570	0.457	1.422	4.975	0.670	1.094	2.093	2.984	1.103
15	Jawa Timur	0.367	2.069	2.178	7.373	0.430	1.957	0.884	4.460	0.897
16	Banten	0.377	0.170	2.446	10.018	0.474	0.871	0.679	1.112	0.322
17	Bali	0.632	8.561	0.738	2.004	0.371	1.856	1.754	1.921	0.924
18	Nusa Tenggara Barat	0.524	13.777	0.619	2.959	1.166	1.194	0.741	3.899	0.796
19	Nusa Tenggara Timur	0.530	5.190	0.531	3.507	1.761	4.474	1.331	10.937	3.459
20	Kalimantan Barat	0.425	0.418	3.387	2.464	1.592	1.757	1.624	7.287	1.305
21	Kalimantan Tengah	0.564	2.907	2.870	4.928	1.271	1.877	1.302	4.547	1.331
22	Kalimantan Selatan	0.611	4.272	1.489	0.976	1.158	0.746	0.982	4.336	0.700
23	Kalimantan Timur	0.190	4.245	5.480	0.544	0.352	0.559	0.578	0.475	0.152
24	Sulawesi Utara	0.454	3.144	1.704	1.516	1.543	1.614	0.678	5.452	1.827
25	Sulawesi Tengah	0.580	14.644	2.288	2.352	2.884	1.947	2.137	19.140	1.814
26	Sulawesi Selatan	0.581	12.983	3.114	1.006	0.604	1.119	0.817	4.771	1.141
27	Sulawesi Tenggara	0.588	5.458	1.528	4.585	1.985	1.693	0.898	9.796	1.360
28	Gorontalo	0.491	2.106	1.320	5.264	1.612	2.152	1.099	6.901	2.159
29	Sulawesi Barat	0.770	0.518	7.092	1.910	1.113	1.698	0.458	5.400	1.332
30	Maluku	0.528	3.233	0.978	9.846	0.317	3.672	1.111	6.167	1.614
31	Maluku Utara	0.526	19.012	14.839	1.937	0.262	2.667	0.808	4.882	1.147
32	Papua Barat	0.460	15.247	6.496	6.433	1.189	1.677	0.811	11.940	0.920
33	Papua	0.238	108.867	0.877	1.004	1.262	1.755	1.066	2.590	0.798
	Sektor	0.234	6.027	1.318	3.556	0.736	0.683	0.702	4.679	0.534

Indeks Produktivitas wilayah dalam suatu sektor

	2006	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Wil
1	N A D	2.152	2.648	3.975	0.359	1.112	1.907	1.241	1.403	2.265	1.226
2	Sumatera Utara	2.279	0.566	2.628	0.524	1.589	1.680	1.431	0.954	2.192	1.072
3	Sumatera Barat	2.148	0.270	2.288	0.705	0.797	1.560	1.850	0.977	2.596	0.954
4	Riau	2.706	7.372	3.335	1.437	1.225	1.818	1.144	0.754	2.492	2.155
5	Jambi	1.440	0.576	1.793	0.635	0.622	1.412	0.977	1.147	1.088	0.629
6	Sumatera Selatan	1.260	4.254	4.531	0.969	2.449	2.060	0.855	1.044	1.493	0.975
7	Bengkulu	1.373	0.120	0.392	0.122	0.626	1.423	1.401	0.780	1.294	0.507
8	Lampung	1.520	0.428	0.652	1.213	0.516	1.327	0.793	1.292	1.064	0.520
9	Bangka-Belitung	3.983	0.072	6.404	0.580	1.208	2.507	1.091	0.596	1.185	1.013
10	Kepulauan Riau	2.745	2.694	6.286	1.808	1.352	4.793	1.551	1.269	1.075	3.181
11	DKI Jakarta	1.663	0.774	3.409	1.222	9.469	4.044	4.954	3.562	4.765	4.480
12	Jawa Barat	1.913	0.524	1.692	1.338	0.446	1.061	0.374	0.327	1.133	0.844
13	Jawa Tengah	1.171	0.108	0.878	0.423	0.446	1.001	0.564	0.536	1.099	0.542
14	D I Y	1.528	0.048	0.676	0.877	0.571	1.005	1.869	0.400	1.294	0.627
15	Jawa Timur	1.309	0.286	1.378	1.729	0.487	2.391	1.051	0.795	1.400	0.834
16	Banten	1.512	0.026	1.740	2.642	0.604	1.196	0.907	0.223	0.565	0.938
17	Bali	1.972	1.037	0.409	0.411	0.368	1.984	1.824	0.300	1.262	0.730
18	Nusa Tenggara Barat	1.121	1.145	0.235	0.417	0.794	0.876	0.529	0.417	0.746	0.501
19	Nusa Tenggara Timur	0.751	0.286	0.134	0.327	0.794	2.175	0.629	0.776	2.148	0.332
20	Kalimantan Barat	1.322	0.050	1.868	0.504	1.573	1.871	1.682	1.132	1.775	0.727
21	Kalimantan Tengah	2.098	0.420	1.894	1.206	1.502	2.392	1.614	0.845	2.168	0.870
22	Kalimantan Selatan	2.454	0.666	1.061	0.258	1.479	1.026	1.314	0.871	1.230	0.940
23	Kalimantan Timur	3.422	2.975	17.556	0.646	2.023	3.459	3.480	0.429	1.199	4.224
24	Sulawesi Utara	1.438	0.386	0.958	0.316	1.553	1.752	0.715	0.863	2.533	0.741
25	Sulawesi Tengah	1.607	1.574	1.125	0.428	2.539	1.848	1.973	2.651	2.200	0.648
26	Sulawesi Selatan	1.785	1.547	1.696	0.203	0.589	1.177	0.836	0.732	1.534	0.718
27	Sulawesi Tenggara	1.378	0.496	0.635	0.707	1.479	1.359	0.701	1.148	1.396	0.548
28	Gorontalo	0.617	0.103	0.294	0.435	0.644	0.926	0.460	0.433	1.187	0.294
29	Sulawesi Barat	1.436	0.038	2.348	0.234	0.660	1.085	0.285	0.504	1.088	0.436
30	Maluku	0.878	0.209	0.289	1.077	0.168	2.093	0.616	0.513	1.175	0.389
31	Maluku Utara	0.755	1.058	3.775	0.183	0.120	1.310	0.386	0.350	0.720	0.335
32	Papua Barat	2.095	2.698	5.256	1.930	1.724	2.620	1.232	2.722	1.837	1.067
33	Papua	1.216	21.564	0.794	0.337	2.048	3.070	1.813	0.661	1.783	1.194

Indeks C

	2004	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Wil.
1	N A D	0.088	0.433	0.111	0.103	0.115	0.101	0.082	0.100	0.078	0.515
2	Sumatera Utara	0.033	0.073	0.074	0.003	0.017	0.031	0.026	0.047	0.018	0.128
3	Sumatera Barat	0.031	0.184	0.125	0.055	0.030	0.048	0.007	0.034	0.001	0.240
4	Riau	0.041	0.686	0.139	0.090	0.066	0.089	0.069	0.108	0.059	0.729
5	Jambi	0.012	0.008	0.018	0.007	0.012	0.013	0.006	0.004	0.009	0.032
6	Sumatera Selatan	0.072	0.246	0.068	0.066	0.004	0.041	0.047	0.044	0.037	0.286
7	Bengkulu	0.010	0.014	0.009	0.006	0.001	0.012	0.012	0.015	0.011	0.032
8	Lampung	0.019	0.012	0.037	0.009	0.003	0.001	0.003	0.044	0.004	0.062
9	Bangka-Belitung	0.018	0.166	0.059	0.008	0.008	0.018	0.002	0.008	0.003	0.178
10	Kepulauan Riau	0.014	0.038	0.132	0.024	0.011	0.077	0.002	0.031	0.013	0.164
11	DKI Jakarta	0.001	0.141	0.153	0.033	0.309	0.071	0.064	0.550	0.081	0.677
12	Jawa Barat	0.036	0.048	0.022	0.069	0.044	0.006	0.045	0.054	0.001	0.126
13	Jawa Tengah	0.037	0.099	0.020	0.014	0.003	0.044	0.018	0.031	0.034	0.127
14	D I Y	0.013	0.055	0.014	0.007	0.003	0.009	0.031	0.011	0.018	0.070
15	Jawa Timur	0.016	0.229	0.098	0.100	0.046	0.076	0.007	0.023	0.004	0.284
16	Banten	0.047	0.340	0.282	0.210	0.080	0.109	0.082	0.191	0.082	0.557
17	Bali	0.016	0.033	0.042	0.014	0.005	0.030	0.033	0.001	0.021	0.076
18	Nusa Tenggara Barat	0.000	0.051	0.061	0.005	0.002	0.010	0.003	0.001	0.001	0.080
19	Nusa Tenggara Timur	0.008	0.030	0.027	0.001	0.011	0.018	0.006	0.012	0.024	0.053
20	Kalimantan Barat	0.001	0.127	0.046	0.005	0.019	0.034	0.021	0.034	0.013	0.146
21	Kalimantan Tengah	0.024	0.104	0.006	0.001	0.006	0.023	0.019	0.018	0.022	0.115
22	Kalimantan Selatan	0.004	0.107	0.041	0.014	0.003	0.012	0.012	0.001	0.003	0.117
23	Kalimantan Timur	0.014	0.120	0.514	0.088	0.029	0.042	0.001	0.101	0.056	0.550
24	Sulawesi Utara	0.009	0.020	0.011	0.001	0.027	0.003	0.009	0.006	0.014	0.041
25	Sulawesi Tengah	0.018	0.035	0.013	0.004	0.007	0.003	0.008	0.020	0.012	0.049
26	Sulawesi Selatan	0.006	0.034	0.023	0.009	0.013	0.020	0.008	0.005	0.015	0.051
27	Sulawesi Tenggara	0.009	0.018	0.015	0.006	0.009	0.005	0.004	0.019	0.009	0.035
28	Gorontalo	0.004	0.020	0.004	0.000	0.002	0.002	0.003	0.012	0.004	0.024
29	Sulawesi Barat	0.010	0.007	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.010	0.006	0.017
30	Maluku	0.005	0.015	0.006	0.002	0.003	0.012	0.005	0.014	0.010	0.028
31	Maluku Utara	0.004	0.008	0.008	0.001	0.002	0.008	0.001	0.003	0.002	0.016
32	Papua Barat	0.010	0.004	0.020	0.014	0.009	0.003	0.001	0.002	0.004	0.029
33	Papua	0.042	0.222	0.044	0.043	0.001	0.017	0.003	0.036	0.003	0.237
	Total	0.163	1.049	0.687	0.312	0.357	0.246	0.176	0.623	0.179	1.528

Indeks Ca

	2004	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Jumlah
1	N A D	-0.088	0.433	-0.111	-0.103	-0.115	-0.101	-0.082	-0.100	-0.078	-0.346
2	Sumatera Utara	0.033	-0.073	0.074	0.003	0.017	0.031	0.026	0.047	0.018	0.177
3	Sumatera Barat	-0.031	-0.184	-0.125	0.055	-0.030	-0.048	-0.007	-0.034	0.001	-0.404
4	Riau	-0.041	0.686	-0.139	-0.090	-0.066	-0.089	-0.069	-0.108	-0.059	0.027
5	Jambi	-0.012	-0.008	-0.018	0.007	-0.012	-0.013	-0.006	0.004	-0.009	-0.068
6	Sumatera Selatan	-0.072	0.246	-0.068	-0.066	-0.004	-0.041	-0.047	-0.044	-0.037	-0.133
7	Bengkulu	0.010	-0.014	-0.009	-0.006	-0.001	0.012	0.012	0.015	0.011	0.030
8	Lampung	0.019	-0.012	-0.037	-0.009	-0.003	0.001	0.003	0.044	0.004	0.009
9	Bangka-Belitung	0.018	-0.166	0.059	-0.008	0.008	0.018	0.002	0.008	0.003	-0.059
10	Kepulauan Riau	0.014	-0.038	0.132	-0.024	-0.011	0.077	-0.002	0.031	-0.013	0.166
11	DKI Jakarta	-0.001	-0.141	-0.153	-0.033	0.309	0.071	0.064	0.550	0.081	0.748
12	Jawa Barat	0.036	-0.048	0.022	0.069	-0.044	0.006	-0.045	-0.054	-0.001	-0.059
13	Jawa Tengah	0.037	-0.099	0.020	0.014	0.003	0.044	0.018	0.031	0.034	0.101
14	DIY	0.013	-0.055	-0.014	0.007	0.003	0.009	0.031	0.011	0.018	0.023
15	Jawa Timur	-0.016	-0.229	-0.098	0.100	-0.046	0.076	0.007	0.023	0.004	-0.179
16	Banten	-0.047	-0.340	-0.282	0.210	-0.080	-0.109	-0.082	-0.191	-0.082	-1.003
17	Bali	0.016	-0.033	-0.042	0.014	-0.005	0.030	0.033	0.001	0.021	0.034
18	Nusa Tenggara Barat	0.000	0.051	-0.061	-0.005	-0.002	-0.010	-0.003	0.001	0.001	-0.026
19	Nusa Tenggara Timur	0.008	-0.030	-0.027	-0.001	0.011	0.018	0.006	0.012	0.024	0.020
20	Kalimantan Barat	0.001	-0.127	0.046	-0.005	0.019	0.034	0.021	0.034	0.013	0.035
21	Kalimantan Tengah	0.024	-0.104	0.006	-0.001	0.006	0.023	0.019	0.018	0.022	0.015
22	Kalimantan Selatan	0.004	-0.107	-0.041	0.014	0.003	-0.012	0.012	0.001	-0.003	-0.129
23	Kalimantan Timur	-0.014	0.120	0.514	-0.088	-0.029	-0.042	0.001	-0.101	-0.056	0.304
24	Sulawesi Utara	0.009	-0.020	-0.011	0.001	0.027	0.003	0.009	0.006	0.014	0.038
25	Sulawesi Tengah	0.018	-0.035	-0.013	0.004	0.007	0.003	0.008	0.020	0.012	0.023
26	Sulawesi Selatan	0.006	0.034	-0.023	-0.009	-0.013	-0.020	-0.008	-0.005	0.015	-0.022
27	Sulawesi Tenggara	0.009	-0.018	-0.015	-0.006	0.009	0.005	0.004	0.019	0.009	0.015
28	Gorontalo	0.004	-0.020	-0.004	0.000	0.002	0.002	0.003	0.012	0.004	0.004
29	Sulawesi Barat	0.010	-0.007	-0.004	0.001	-0.001	0.001	-0.001	0.010	0.006	0.014
30	Maluku	0.005	-0.015	-0.006	-0.002	-0.003	0.012	0.005	0.014	0.010	0.020
31	Maluku Utara	0.004	-0.008	0.008	-0.001	-0.002	0.008	0.001	0.003	0.002	0.015
32	Papua Barat	0.010	-0.004	0.020	-0.014	0.009	0.003	0.001	0.002	0.004	0.033
33	Papua	-0.042	0.222	-0.044	-0.043	0.001	-0.017	-0.003	-0.036	-0.003	0.036
	Total	-0.056	-0.141	-0.442	-0.014	-0.032	-0.014	-0.072	0.241	-0.010	-0.541

Indeks Produktivitas sektor dalam suatu wilayah

	2004	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	N A D	0.402	52.078	3.801	0.834	0.561	0.761	0.712	2.209	0.633
2	Sumatera Utara	0.541	2.837	3.206	4.537	1.231	0.972	1.258	4.716	0.737
3	Sumatera Barat	0.525	4.132	1.776	36.565	1.203	0.893	1.919	4.993	1.406
4	Riau	0.339	25.520	1.552	0.902	0.534	0.390	0.410	1.026	0.315
5	Jambi	0.528	16.294	3.395	13.749	1.090	1.040	1.466	7.340	0.786
6	Sumatera Selatan	0.315	36.521	3.506	2.213	2.205	1.013	0.799	4.565	0.658
7	Bengkulu	0.645	4.246	1.122	1.675	0.801	1.504	2.402	7.577	1.309
8	Lampung	0.738	9.201	1.654	3.302	1.174	0.975	1.342	9.978	0.884
9	Bangka-Belitung	0.650	0.895	5.363	1.437	1.163	1.022	0.700	3.080	0.492
10	Kepulauan Riau	0.318	2.944	2.148	0.575	0.309	1.020	0.381	2.423	0.124
11	DKI Jakarta	0.199	1.644	0.948	2.109	2.270	0.566	0.768	4.195	0.537
12	Jawa Barat	0.558	6.620	2.416	8.303	0.491	0.761	0.484	2.008	0.564
13	Jawa Tengah	0.559	1.151	1.910	5.132	0.796	0.996	1.058	3.918	0.912
14	D I Y	0.615	0.557	1.260	6.119	0.921	0.828	2.955	3.496	1.024
15	Jawa Timur	0.400	2.851	2.126	14.174	0.697	1.422	1.237	4.774	0.769
16	Banten	0.400	0.145	2.461	50.209	0.560	0.704	0.871	1.296	0.298
17	Bali	0.613	1.499	0.657	7.462	0.600	1.313	2.633	2.742	1.141
18	Nusa Tenggara Barat	0.543	18.477	0.425	3.994	1.348	0.720	1.114	4.873	0.887
19	Nusa Tenggara Timur	0.611	1.570	0.196	3.939	2.780	2.451	1.645	8.198	2.510
20	Kalimantan Barat	0.407	0.552	4.687	3.531	2.067	1.693	2.183	7.777	1.046
21	Kalimantan Tengah	0.668	0.884	2.151	3.420	1.177	1.340	1.817	4.897	1.305
22	Kalimantan Selatan	0.534	5.924	1.658	12.104	1.456	0.719	1.668	4.307	0.666
23	Kalimantan Timur	0.200	6.594	4.952	0.626	0.451	0.316	0.600	0.935	0.117
24	Sulawesi Utara	0.524	5.739	1.605	4.750	2.306	0.785	1.224	3.680	0.991
25	Sulawesi Tengah	0.764	2.776	1.557	6.764	1.665	0.914	1.598	7.462	1.162
26	Sulawesi Selatan	0.614	16.046	2.666	5.431	1.044	0.755	1.114	4.487	1.233
27	Sulawesi Tenggara	0.653	5.684	1.239	2.717	2.045	1.074	1.351	8.682	1.187
28	Gorontalo	0.635	0.517	1.442	4.949	1.446	0.965	1.357	8.832	1.136
29	Sulawesi Barat	0.851	3.464	1.790	6.734	0.994	0.954	0.755	8.547	1.338
30	Maluku	0.566	1.274	1.108	2.930	0.373	1.963	1.593	9.616	1.550
31	Maluku Utara	0.591	4.392	3.977	2.859	0.404	1.722	0.974	4.858	0.873
32	Papua Barat	0.557	7.152	3.759	0.845	1.604	0.787	0.887	3.398	0.694
33	Papua	0.239	32.870	1.369	0.846	2.005	0.809	1.568	1.997	0.982
	Sektor	0.391	10.333	2.145	5.840	1.146	1.061	1.054	7.577	0.853

Indeks Produktivitas wilayah dalam suatu sektor

	2004	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Wil
1	N A D	1.643	8.056	2.833	0.228	0.783	1.147	1.079	0.466	1.186	1.598
2	Sumatera Utara	1.410	0.280	1.524	0.792	1.096	0.934	1.216	0.635	0.881	1.019
3	Sumatera Barat	1.217	0.363	0.752	5.683	0.953	0.764	1.652	0.598	1.496	0.908
4	Riau	2.126	6.055	1.774	0.379	1.143	0.900	0.953	0.332	0.906	2.452
5	Jambi	0.874	1.022	1.026	1.526	0.617	0.635	0.901	0.628	0.597	0.648
6	Sumatera Selatan	0.776	3.403	1.574	0.365	1.854	0.920	0.730	0.580	0.743	0.963
7	Bengkulu	0.787	0.196	0.250	0.137	0.334	0.678	1.089	0.478	0.734	0.478
8	Lampung	1.011	0.477	0.413	0.303	0.549	0.492	0.681	0.705	0.555	0.536
9	Bangka-Belitung	1.830	0.095	2.755	0.271	1.119	1.062	0.732	0.448	0.636	1.102
10	Kepulauan Riau	2.692	0.943	3.314	0.326	0.891	3.180	1.197	1.058	0.482	3.309
11	DKI Jakarta	2.294	0.717	1.993	1.628	8.931	2.403	3.283	2.495	2.840	4.507
12	Jawa Barat	1.286	0.578	1.016	1.283	0.387	0.647	0.414	0.239	0.596	0.902
13	Jawa Tengah	0.739	0.058	0.461	0.455	0.360	0.486	0.520	0.268	0.554	0.518
14	D I Y	0.889	0.030	0.332	0.593	0.455	0.442	1.586	0.261	0.680	0.566
15	Jawa Timur	0.820	0.222	0.796	1.950	0.489	1.077	0.942	0.506	0.724	0.803
16	Banten	1.032	0.014	1.157	8.671	0.493	0.669	0.833	0.173	0.353	1.009
17	Bali	0.980	0.091	0.192	0.800	0.328	0.775	1.564	0.227	0.838	0.626
18	Nusa Tenggara Barat	0.660	0.851	0.094	0.325	0.560	0.323	0.503	0.306	0.495	0.476
19	Nusa Tenggara Timur	0.461	0.045	0.027	0.199	0.716	0.682	0.460	0.319	0.869	0.295
20	Kalimantan Barat	0.725	0.037	1.524	0.422	1.258	1.113	1.444	0.716	0.855	0.697
21	Kalimantan Tengah	1.455	0.073	0.856	0.500	0.877	1.078	1.470	0.551	1.306	0.853
22	Kalimantan Selatan	1.177	0.494	0.667	1.787	1.096	0.585	1.365	0.490	0.674	0.862
23	Kalimantan Timur	2.644	3.310	11.977	0.556	2.044	1.544	2.953	0.640	0.711	5.187
24	Sulawesi Utara	1.114	0.462	0.622	0.676	1.674	0.616	0.965	0.404	0.967	0.832
25	Sulawesi Tengah	1.224	0.168	0.455	0.726	0.911	0.540	0.950	0.617	0.854	0.627
26	Sulawesi Selatan	1.236	1.224	0.980	0.733	0.718	0.561	0.833	0.467	1.140	0.788
27	Sulawesi Tenggara	0.868	0.286	0.300	0.242	0.929	0.527	0.667	0.596	0.724	0.520
28	Gorontalo	0.526	0.016	0.218	0.275	0.409	0.295	0.417	0.378	0.432	0.324
29	Sulawesi Barat	0.889	0.137	0.341	0.471	0.355	0.367	0.293	0.461	0.641	0.409
30	Maluku	0.574	0.049	0.205	0.199	0.129	0.735	0.600	0.504	0.722	0.397
31	Maluku Utara	0.537	0.151	0.659	0.174	0.125	0.577	0.328	0.228	0.364	0.355
32	Papua Barat	1.640	0.798	2.020	0.167	1.614	0.855	0.969	0.517	0.937	1.152
33	Papua	0.657	3.423	0.687	0.156	1.883	0.820	1.600	0.284	1.239	1.076